

Editor:
Krisdyatmiko dan Abdur Rozaki

Mengembangkan Gampong Peduli Hak Anak

Pembelajaran Bersama di Empat Gampong di Aceh Besar



“Pada anak
masa depan
gampong bertumpu.
Kepedulian
pada pemenuhan
hak-hak anak
bukan sekadar
tanggung jawab
orang tua
dalam keluarga,
namun juga
pemerintahan
gampong”

ISBN 979813842-2



Editor: Krisdyatmiko dan Abdur Rozaki

Mengembangkan Gampong Peduli Hak Anak
Pembelajaran Bersama di Empat Gampong di Aceh Besar



Tata Pemerintahan Gampong Yang Peduli Hak Anak

Sebuah Inisiasi Baru

Tanggal 26 Desember 2004, sekitar jam 8 pagi, bumi Aceh mengalami getaran hebat, gelombang air laut bergerak kencang memecah dan menghancurkan berbagai bangunan fisik, dari rumah, gedung, jembatan dan lainnya. Gelombang air laut itu menghantam dan menyapu bersih apa saja yang dilaluinya. Ribuan nyawa anak manusia dari berbagai kelompok usia ikut tertelan menjadi korban dari peristiwa yang oleh para ilmuwan disebut sebagai gempa yang diikuti dengan tsunami dengan kekuatan 8,9 skala richter. Hampir sebagian kota dan daerah di provinsi yang dikenal dengan sebutan Serambi Makkah ini rata dengan tanah paska peristiwa itu. Tumpukan mayat, sampah menggumpal berceceran. Lautan tangis dan duka lara berkumandang dari para korban selamat, juga siapa saja yang melihat potret peristiwa itu dari tayangan stasiun televisi.

Aceh kembali berduka. Setelah sebelumnya dilanda konflik berkepanjangan yang menelan ribuan nyawa melayang, anak kehilangan orang tua, para istri yang men-

janda dan sanak keluarga, kerabat, teman yang menderita cacat akibat dampak perang. Kini mereka menghadapi bencana tsunami yang jauh lebih dahsyat dari peristiwa apapun yang mereka alami sebelumnya. Peristiwa tsunami tidak saja mengguncang nalar, tapi juga mengasah kepekaan, empati dan solidaritas kemanusiaan yang begitu dalam, terutama bagi mereka yang selama ini saling berhadapan dengan konflik. Dari peristiwa itu, lembaran baru Aceh dimulai, sejarah baru Aceh ditulis kembali.

Peristiwa tsunami menggerakkan solidaritas kemanusiaan lintas batas negara, suku, agama dan ikatan profesi lainnya yang bagai tarikan gelombang membanjiri Aceh. Berbagai bantuan kemanusiaan berdatangan untuk membantu penderitaan warga Aceh. Pemerintah pusat dan daerah juga membuka secara lebar bantuan-bantuan kemanusiaan yang datang serta adanya program-program rekonstruksi dan rehabilitasi agar kehidupan warga Aceh kembali normal. Pemandangan ini sangat kontras saat masa-masa konflik, dimana bantuan kemanusiaan terhadap korban konflik sangat dibatasi dan dikontrol sedemikian ketat oleh pemerintah. Tak lama usai tsunami berlalu, perjanjian damai di Helsinki antara pemerintah RI dengan GAM mengakhiri konflik-perang. Genderang damai berkumandang membangkitkan kembali impian hidup indah yang hampir redup oleh kematian.

Pasca penandatanganan perdamaian Helsinki, suasana Aceh mengalami perubahan cukup berarti. Konflik dan kekerasan yang berkepanjangan akhirnya berhenti, dan tata pemerintahan mulai dibangun dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹ Sebagai dasar pelaksanaan keberlanjutan perdamaian dan pembangunan di Aceh, lalu diterbitkan

1 Setelah perjalanan panjang konflik dan kekerasan di Aceh telah menelan korban dan menyebabkan penderitaan rakyat banyak, pada tanggal 15 Agustus 2005 dilakukan penandatanganan kesepakatan damai antara pihak yang berkonflik yakni RI - GAM di Helsinki sebagai peletak dasar kehidupan baru di Aceh.

Undang-undang nomer 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah ditandatangani secara resmi, menjadi lembaran negara pada 1 Agustus 2006.² Regulasi itu dijadikan sebagai dasar berpijak untuk melakukan pembaharuan tata pemerintahan di Aceh, sekaligus mendorong munculnya inisiasi masyarakat sipil untuk lebih berperan aktif memadukan kepentingan bagi pencapaian kesejahteraan bersama.

Pengalaman sejauh ini menunjukkan, perdamaian Aceh telah memberi arti tersendiri bagi kehidupan masyarakat Aceh. Kendatipun masih banyak tantangan yang dihadapi semenjak hasil kesepakatan damai itu, paling tidak upaya-upaya strategis yang bernilai positif makin bermunculan di Aceh.³

Isu dan agenda penting dalam rangka pembenahan tata kelola (*governance*) itu adalah memperkuat kembali masyarakat dan pemerintahan gampong. Dalam rentang sejarahnya, terutama era konflik dan kekerasan sebelum terjadi perdamaian di Aceh, gampong relatif mengalami keterpurukan yang sistematis. Situasi gampong tidak berdaya, selain secara struktural berada dalam dominasi kabupaten, model homogenisasi politik kebudayaan masa lalu telah meruntuhkan posisi gampong sebagai entitas sosial, ekonomi, politik dan budaya.⁴ Dengan demikian, gambaran gampong tidak lebih mengekspresikan porak-porandanya komunitas sipil di akar rumput, dengan resiko ketidakberdayaan yang mereka alami.⁵ Dalam konteks itu

2 Arie Sujito dkk, *Membangun Aceh dari Gampong*, IRE-LOGICA, Yogyakarta, 2007.

3 Ikrar Nusa Bhakti (penyunting), *Beranda Perdamaian, Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, P2P LIPI Pustaka Pelajar, Jakarta - Yogyakarta, 2008.

4 Afadlal dkk (Irine, editor), *Runtuhnya Gampong di Aceh*, Pustaka Pelajar P2P-LIPI, Yogyakarta - Jakarta, 2008; Arie Sujito, *Melepas Jeratan Kolonisasi*, IRE Press, Yogyakarta, 2005.

5 Heru Cahyono, *"Dampak Konflik pada Kehidupan Pedesaan di Aceh"* dalam Ikrar Nusa Bhakti, *opcit*, 2008.

semua, upaya-upaya baru untuk membangun Aceh sebagai wujud kelembagaan perdamaian berkelanjutan sangat dibutuhkan. Gampong, dengan demikian menjadi isu strategis untuk menjamin tata baru masyarakat Aceh.⁶



Tata kelola pemerintahan yang baik menjamin pemenuhan hak anak.

Secara spesifik, dalam pasal 2 UUPA disebutkan, pemerintahan Aceh dibagi dalam 4 tingkatan yakni kota/kabupaten, kecamatan, mukim dan gampong. Masing-masing pemerintahan ini mempunyai kewenangan yang berbeda. Sesuai pasal 114 UUPA tersebut, mukim yang merupakan kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, mukim memiliki kewenangan urusan pelayanan yang harus diatur lebih jelas dalam Qanun Aceh.

6 Arie Sujito, *Opcit.*

Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Penataan pemerintahan gampong mirip dengan desa di wilayah lain di Indonesia, dimana pemerintahan gampong terdiri dari keuchik (kepala desa) dan Tuhapeut (nama lain Badan Permusyawaratan Desa). Keuchik dipilih langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sebagian besar gampong belum memiliki Tuhapeut, sementara di gampong yang sudah ada Tuhapeut difungsikan sebagai lembaga adat, karena memang lembaga ini hingga sekarang belum dapat berfungsi sebagaimana tugas dan fungsinya sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa di tempat lain.⁷

Gampong dan mukim sebagai entitas masyarakat hukum di Aceh adalah pilar utama bagi kelangsungan otonomi Aceh.⁸ Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indeks kemandirian gampong dan mukim yang memiliki otonomi asli, baik dalam kapasitas pemerintahan masyarakat (*self governing*) maupun pelayanan masyarakat (*public services*) terutama perempuan dan anak-anak. Tingkat kesejahteraan perempuan dan anak-anak sering terlupakan sebagai indikator utama kesuksesan sebuah proses pembangunan. Aceh yang mengalami persoalan politik di masa lalu, menyisakan permasalahan besar atas kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Kelompok anak dan perempuan sebagai kelompok terbesar yang mengalami ketertinggalan terhadap akses politik dan ekonomi, belum mendapatkan kesempatan yang layak baik di masa lalu

7 Sutoro Eko dkk, *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*, IRE-LOGICA, Yogyakarta, 2007.

8 Afadlal dkk (Irine, editor), 2008, *opcit*.

maupun masa kini. Hal ini menjadikan kebutuhan dasar kedua kelompok ini semakin jauh dapat terpenuhi.⁹

Guna merespon kembalinya mukim dalam tata pemerintahan Aceh, dipandang perlu dilakukan kajian yang mendalam sehingga mukim menjadi lembaga yang independen. Peran mukim mengalami perubahan di beberapa tahun terakhir sebagai implikasi sejarah dan qanun yang telah ada. Alih-alih qanun yang diterbitkan oleh provinsi maupun kabupaten/kota tentang mukim dan gampong belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena faktor sumberdaya manusia dan infrastruktur yang tidak mendukung, sehingga penguatan kedua lembaga ini menjadi kurang jelas dalam kaitannya dengan implementasi tata pemerintahan mukim dan gampong. Hirarkhi kewenangan Aceh mulai dari provinsi hingga gampong, terutama di level kabupaten/kota ke bawah masih tumpang tindih. Hal ini membutuhkan perhatian yang serius, supaya ruang konflik yang masih rawan tidak kembali terkoyak. Peluang yang diberikan pemerintah dalam UUPA untuk pengaturan gampong dan mukim di tingkat pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota adalah tantangan bagi Aceh untuk menata pemerintahannya yang lebih aspiratif dan sesuai dengan preferensi masyarakat warga, dan kesempatan ini tidak dimiliki oleh provinsi lain.¹⁰

Landasan pelaksanaan pemerintahan gampong adalah peraturan gampong yang ditetapkan oleh pemerintahan gampong, yakni keuchik dan Tuhapeut sebagai lembaga pemerintahan desa/gampong. Ada beberapa ketentuan penyelenggaraan pemerintahan gampong, sebagai pemerintah otonom, yang perlu ditetapkan dalam qanun gampong, diantaranya adalah, Qanun Gampong tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Gampong tentang Perencanaan Gampong, Qanun Gampong tentang Angga-

9 Sutoro Eko dkk, 2007, *opcit.*

10 Arie Sujito dkk, 2007, *opcit.*

ran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), Qanun Gampong tentang Sumber Pendapatan Gampong, Usaha Gampong, Pungutan Gampong, Kewenangan Gampong, dan beberapa qanun gampong lainnya yang dibutuhkan oleh gampong atas inisiatif keuchik, Tuhapeut, maupun masyarakat.¹¹

Selama puluhan tahun, desa atau gampong sebagai sub pemerintahan di bawah kecamatan tidak memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sejarah telah membentuk gampong bergantung kepada pemerintahan supra gampong maupun pihak luar. Inisiatif lokal untuk mengembangkan kemandirian hampir tidak ada dan permasalahan umumnya diselesaikan oleh pihak dari luar gampong. Gampong tidak lebih menjadi obyek pembangunan dan entitas yang lemah dan bergantung.

Penguatan gampong dapat diawali dari penguatan kelembagaan gampong mulai dari lembaga-lembaga pemerintahan gampong dan tata pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan gampong yang ditetapkan dengan peraturan (qanun) gampong. Pagar dan rel yang dibangun dalam qanun tersebut menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipertanggungjawabkan oleh keuchik dan di evaluasi setiap tahun. Bentuk peraturan gampong ada dua yakni Peraturan (Qanun) Gampong dan Peraturan Keuchik yang diterbitkan untuk pelaksanaan Peraturan (Qanun) Gampong (pasal 59 PP nomer 72 tahun 2005 tentang Desa). Sebagai contoh, Perencanaan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) ditetapkan dengan Qanun Gampong sedangkan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Gampong ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.

Selama ini gampong di Aceh memiliki pengalaman sangat minim dalam menyusun peraturan (qanun) gampong maupun peraturan keuchik. Beberapa aturan yang

11 Farid Hadi dalam Arie Sujito dkk, 2007, *ibid*.

berjalan di gampong selama ini umumnya adalah aturan adat yang tidak tertulis yang disebut reusam. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan gampong yang harus dipertanggungjawabkan, aturan adat semata tidaklah mencukupi. Oleh karena itu, ke depan gampong perlu belajar bagaimana merumuskan sebuah peraturan (qanun) yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan gampong dan yang tidak bertentangan dengan peraturan (qanun) di atasnya sebagaimana diatur dalam UU nomer 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹²

Upaya-upaya mengangkat gampong sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memberikan kesejahteraan bagi perempuan dan anak adalah sesuatu yang tidak mudah. Dengan sumberdaya alam yang dimilikinya, gampong seringkali tidak didukung ketersediaan SDM yang memadai. Untuk memulai pemerintahan gampong yang memberikan daya tumbuhnya pada upaya-upaya menyejahterakan anak, perlu didorong sejak perencanaan gampong, ketersediaan program serta pendanaan, dan pemahaman yang utuh tentang hak-hak anak. Dalam konteks semacam itu, anak-anak di Aceh yang mengalami trauma peristiwa masa lalu dan bencana tsunami tidak hanya cukup diakui dan diberikan sarana dan prasarana dasar. Namun, lebih dari sekedar itu diperlukan program yang lebih luas agar dapat terpenuhi hak dasarnya. Berkaitan dengan hak, dapat dipastikan bahwa anak-anak di Aceh telah terampas hak-haknya baik hak untuk hidup (*survival rights*), hak akan perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) maupun hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak - KHA (*Convention on the Rights of the Child*). Bersama 191 negara lainnya, Indonesia pun telah meratifikasinya pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui

12 *Ibid.*

Keputusan Presiden nomer 36 tahun 1990.

Kebutuhan penguatan kapasitas untuk pembangunan gampong yang berorientasi pada pembangunan anak, sebagai dijelaskan di atas, tentu perlu dijumpai oleh peran organisasi-organisasi sipil (CSO) sebagai kader di aras komunitas. Peran mereka ini, menjadi akselerasi bagi dukungan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat di aras lokal, seperti gampong. Sejauh ini, peran mereka telah banyak membantu membangun kapasitas aparat Gampong, termasuk pula organisasi kewargaan dalam rangka mengakselerasi perubahan menyesuaikan kebutuhan pembaharuan tata pemerintahan di Aceh. Sebagai bagian dari agen pembaharuan, para *partner* di gampong perlu pula dibekali pemikiran, dan ketrampilan berkenaan transformasi substansi dan strategi pembangunan gampong berorientasi pada pemberdayaan anak. Bagi kalangan CSO, memang topik pemberdayaan anak memang bukan hal yang baru. Namun, memasukkan substansi pemberdayaan anak dalam skema perencanaan pembangunan gampong melalui pendekatan *agencies* relatif baru. Dengan cara pandang dan pemahaman itulah, upaya membangun kapasitas memulai dengan fasilitasi agen-agen dan kader di CSO untuk pembangunan gampong yang berpihak pada pemberdayaan anak sangat diperlukan. Jika basis penguatan agen pembaharuan ini dapat dilakukan, transformasi ini juga akan dikerjakan dan diperluas langsung pada aktor-aktor strategis di gampong, termasuk pada masyarakat secara langsung.

Arah dan Orientasi

Upaya untuk melakukan intervensi dalam bentuk program yang memadukan perspektif pemberdayaan pemerintahan lokal dengan orientasi keberpihakan pada anak sangat penting. Strategi ini paling tidak akan mendorong langkah-langkah maju, yakni mampu meningkatkan kapa-

sitas kader yang selama ini bekerja dalam pendampingan di akar rumput (*grass root*), pemerintahan dan aktor-aktor masyarakat sipil gampong dalam rangka pembangunan gampong yang berorientasi pada pemberdayaan anak. Selain itu, diharapkan intervensi itu diharapkan mampu memberikan penguatan (*capacity building*) pada fasilitator, pemerintah gampong dan masyarakatnya. Secara spesifik diarahkan untuk : (1) melakukan kajian secara partisipatif terhadap potensi dan kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi oleh pemerintahan gampong; (2) melatih dan memfasilitasi pembentukan dan penguatan gampong yang mempunyai program pembangunan yang sensitif bagi anak-anak di dua kecamatan (kader lokal, LSM lokal, pemerintah gampong, perempuan dan anak-anak); (3) melatih dan memfasilitasi penyusunan peraturan (qanun) gampong dan atau keputusan keuchik tentang perlindungan anak kepada aparat pemerintahan gampong.

Untuk mewujudkan tujuan program di atas, dilakukan kerjasama antara Plan International-Aceh dengan Gita Pertiwi (GP) Solo dan IRE Yogyakarta. Tiga aktor ini memiliki kekuatannya masing-masing untuk mendukung perwujudan gampong yang peduli pada anak. Plan International memang secara khusus memiliki orientasi pada isu anak-anak. Di Aceh, Plan International telah lama hadir dan mengambil peran strategis sejak masa tanggap darurat paska bencana tsunami. Gita Pertiwi merupakan lembaga lingkungan yang humanistik melalui pendekatan pemecahan masalah-masalah lingkungan hidup secara holistik. IRE Yogyakarta sebagai lembaga penelitian dan pemberdayaan untuk pengembangan sikap kritis masyarakat, telah memiliki pengalaman panjang dalam penguatan gampong di Aceh.

Lokasi implementasi program di empat gampong di dua kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Dua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Lhoong dengan Gampong

Birek dan Gapuy serta Kecamatan Lhoknga dengan Gampong Lamgirek dan Aneuk Paya. Pemilihan lokasi ini didasari dua pertimbangan. *Pertama*, keempat gampong tersebut merupakan wilayah terjauh dan terdekat dari pusat akses masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas ini, diharapkan akan mudah terjadi replikasi pada gampong-gampong lain di Aceh Besar yang letaknya di antara dua gampong di Kecamatan Lhoong dan dua gampong di Kecamatan Lhoknga. *Kedua*, gampong-gampong tersebut merupakan wilayah kerja Plan Internasional sehingga ada keterkaitan dengan program-program sebelumnya. Plan International telah memiliki kader-kader di keempat gampong ini sehingga menguntungkan baik dari sisi substansial maupun teknis. Secara substantif, terjadi pengkayaan wacana dan keterampilan dalam diri kader-kader tersebut untuk meng-



Pemenuhan hak anak menjadi tanggungjawab bersama.

integrasikan pendekatan pemenuhan hak anak dengan aspek kebijakan gampong. Dari sisi teknis, keberadaan kader-kader ini akan mempermudah implementasi program karena mereka telah mengenal dan dikenal oleh pemerintahan dan masyarakat di keempat gampong.

Kerangka Berfikir

Reformasi tata pemerintahan gampong diperlukan seiring makin besarnya tuntutan tanggung jawab pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Se jauh ini soal qanun kabupaten yang memberikan kewenangan yang jelas kepada gampong sangat dibutuhkan, terutama seberapa besar ototritas-otoritas kemandirian dalam perencanaan pembangunan. Pengalaman sejauh ini menunjukkan bahwa, ketidakjelasan ini mempersulit gampong untuk mengambil inisiatif-inisiatif dalam rangka memajukan pembangunan di masyarakat. Menunggu kehendak atau kemauan pemerintah kabupaten, seringkali terjadi hambatan.

Dalam konteks itu, kebutuhan mendasar yang perlu dilakukan adalah memetakan bermacam inisiatif-inisiatif di aras gampong sejauh (berdasarkan pengalaman lokal) yang telah berlangsung mencakup beberapa hal penting : (1) memperjelas dan melembagakan urusan dan fungsi yang berkaitan dengan anak di dalam pemerintahan gampong; (2) perlu adanya institusi gampong yang berfungsi mengurus anak secara khusus untuk memastikan perhatian dan kepekaan pembangunan pada anak.

Untuk kebutuhan itulah, perlu kiranya (1) diidentifikasi urusan-urusan lokal gampong (bisa saja berbasis regulasi lama atau qanun baru), misalnya kepala urusan kesejahteraan rakyat, sejauh ini apa yang sudah ada diformulasikan dalam kebijakan desa secara konkrit. Demikian pula (2) langkah strategis adalah memasukkan urusan anak dalam perencanaan pembangunan gampong; (3) secara

lebih spesifik yang adanya peraturan gampong berkenaan dengan pemberdayaan anak; (4) berkenaan dengan skema bantuan dan anggaran dalam kebijakan anggaran dan pendapatan belanja gampong (APBG), kemudian; (5) memasukkan isu anak dalam pemanfaatan ADG (alokasi dana gampong) sehingga bisa teralokasikan *posting* anggaran yang diperuntukkan program pemberdayaan anak. Peluang pemanfaatan ADG ini telah dimiliki oleh Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah merumuskan serangkaian kebijakan terkait dengan keuangan gampong. Sebagai contoh, Keputusan Bupati Aceh Besar nomer 94 tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman Perencanaan ADG Kabupaten Aceh Besar, Keputusan Bupati Aceh Besar nomer 75 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan ADG Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Aceh Besar nomer 04 tahun 2008 tentang Keuangan Gampong. Jaminan kepastian gampong akan memperoleh ADG tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Besar nomer 116 tahun 2008 tentang Penetapan Besar Alokasi Dana Gampong Kabupaten Aceh Besar tahun 2008.

Upaya mengintegrasikan pendekatan pemenuhan hak anak dengan kebijakan gampong sebenarnya telah memiliki payung hukum dari kebijakan supra gampong. Di level nasional, sebagai tindak lanjut meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia telah menerbitkan UU nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Keppres nomer 77 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, dalam UU nomer 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga memberi jaminan hukum secara khusus pada perlindungan anak-anak Aceh. Dalam pasal 231 UU itu disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.

Pemerintah Provinsi NAD dan Kabupaten Aceh Besar pun telah menerbitkan kebijakan berkaitan dengan hal ini. Pemerintah Provinsi NAD melalui Keputusan Gubernur NAD nomer 260/494 tahun 2006 telah menetapkan keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi NAD. KPAID ini memiliki tugas untuk : (1) melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak; (2) menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak yang berwenang; (3) menyampaikan dan memberikan masukan, saran, serta pertimbangan kepada berbagai pihak terutama gubernur, DPRD, instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (4) mengumpulkan data dan informasi tentang masalah perlindungan anak; (5) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang perlindungan anak; dan (6) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi NAD.

Di tingkat kabupaten, pada tahun 2007 Bupati Aceh Besar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Besar nomer 200 tahun 2007 tentang Pembentukan Forum Anak Aceh Besar. Kepengurusan forum ini terdiri dari 37 anak yang merupakan perwakilan dari seluruh kecamatan di Aceh Besar. Menurut bupati, anak-anak harus ditingkatkan partisipasinya. Forum anak merupakan wadah dimana aspirasi anak-anak dapat ditampung untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat. Selain itu, sejak tahun 2007 bupati juga telah mencanangkan Kecamatan Kota Jantho sebagai Kota Layak Anak.

Beberapa Isu Penting

Problem anak dalam rentang konflik dan kekerasan, serta peristiwa tsunami telah mendorong tumbuhnya inisiatif-inisiatif lokal yang dikerjakan oleh berbagai pihak.

Dalam konteks itu, program ini telah berhasil menemukan peta penting. Sejauh ini, tak bisa dipungkiri bahwa anak dalam posisi keluarga dalam masyarakat Aceh mendapat perhatian yang cukup baik, meskipun kelompok inilah yang paling rentan dalam kancah konflik. Upaya-upaya strategis dengan berbagai pendekatan, arahnya adalah anak didorong untuk bisa mampu tumbuh dan berkembang secara manusiawi. Dalam hal pendidikan misalnya, anak mendapatkan pendidikan agama yang layak dan harus bisa menerapkan syariat Islam seperti yang diinginkan oleh para orang tua. Dalam ini, harapannya, anak bisa berbakti dan mengabdikan pada keluarga dan masyarakat dengan landasan agama dan etika kultural. Secara khusus, anak perempuan mendapatkan posisi yang lebih baik dalam keluarga masyarakat Aceh, terutama perlindungan anak perempuan dari segala bentuk ancaman.

Kondisi gampong yang berbeda dalam konteks bencana menyebabkan perbedaan latar belakang pembangunan. Gampong yang menjadi korban sebagai dampak bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, seperti Gapuy dan Birek di Aceh Besar tidak lagi mampu berkembang dengan baik secara cepat. Upaya *recovery* masih cukup lamban, dan membutuhkan bermacam akselerasi intervensi program. Sejauh ini, program yang telah dilakukan oleh masyarakat seperti partisipasi dalam kegiatan Posyandu dan Polindes telah ditempuh. Dalam program ini, PLAN International misalnya banyak menerapkan program bagi kelompok masyarakat, khususnya kader Posyandu untuk program pemberdayaan anak-anak.

Namun demikian, urusan yang menyangkut perbaikan masa depan anak tak dapat ditempuh secara sendiri-sendiri, dibutuhkan kebersamaan antara kader-kader di dalam masyarakat dan pemerintahan di tingkat gampong. Terlebih menyangkut isu anak, banyak sekali kompleksitas masalah yang membutuhkan pemecahan secara serius dan

berkelanjutan menyangkut isu hak-hak anak ini. Dari isu pembangunan kesehatan yang layak untuk anak, pendidikan sampai pada partisipasi anak dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi di sini titik tekannya adalah bagaimana anak-anak dilibatkan pada proses perencanaan pembangunan terhadap keberpihakan program yang mampu memperhatikan kebutuhan dasar mereka. Anak-anak juga diberi kesempatan dalam membangun pilihan-pilihan atas impian yang diinginkan di gampongnya.

Proses untuk mendorong masyarakat dan pemerintah gampong peduli atas hak anak agar dapat saling bersinergi masih menjadi pekerjaan besar di masa kini dan masa depan. Terlebih proses advokasi yang mendorong agar kabupaten makin peduli atas hak-hak anak tentu membutuhkan tenaga yang lebih besar lagi. Kini pekerjaan besar itu telah mulai dirintis, setidaknya di empat gampong yang menjadi lokasi rintisan program ini. Berbagai proses telah dilakukan, setidaknya kurang lebih selama 5 bulan Plan International - GP - IRE Yogyakarta menggulirkan program peduli hak anak di dalam kelembagaan gampong. Bagaimana proses dinamikannya dapat dibaca di bagian berikutnya dari bab ini.

Pengalaman Lokal

Kisah duka lara anak-anak di Aceh terutama selama pusaran konflik dan perang cukup menyedihkan. Selama masa konflik itu, tak sedikit anak-anak yang mengalami luka, cacat, meninggal atau mengalami trauma, terlebih ketika orang tuanya menjadi korban atau kerabat dan teman-teman bermainnya. Kondisi ini tak jarang membuat mereka mengalami berbagai tekanan dan kerentanan sehingga mengalami trauma dan beban penderitaan lainnya. Data yang terhimpun di Satkorlak (Satuan Koordinasi Pelaksana yang biasanya menangani bencana) Aceh pada Maret 2003 menyebutkan bahwa selama konflik di Aceh telah menyebabkan 58.127 anak jadi yatim, 52.292 anak terlantar dan 61.056 balita kurang gizi.¹

Pada 26 Desember 2004 Aceh diguncang gempa bumi yang diikuti tsunami. Korban kembali berjatuhan, termasuk anak-anak. Berdasarkan data *Interagency Group on Family Tracing and Reunification*² menyebutkan bahwa lebih

- 1 Naskah Akademik Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, dalam <http://images.cicatjeh.multiply.com/attachment/0/R0j6QgoKCqIAAAbusKEI/Naskah%20Akademk.doc>, diakses tanggal 04 Februari 2009.
- 2 *Family Tracing and Reunification* (Jaringan Penelusuran dan Penyatuan Kembali Keluarga) adalah sebuah jaringan

dari 2.852 anak yang terpisah dari keluarganya karena tsunami. Ribuan anak juga terlantar di panti-panti yang tersebar di Aceh dan di luar Aceh. Paska tsunami, muncul isu perdagangan anak-anak Aceh yang telah ditinggal oleh orang tua dan keluarganya. Anak-anak itu dibawa oleh sekelompok orang dengan kedok bahasa yang digunakan untuk diangkat sebagai anak asuh. Untung kejadian itu segera terbongkar, berbagai pihak segera melakukan tindakan dan melakukan pencegahan. Konflik dan tsunami sebagai dua peristiwa besar itu melengkapi penderitaan anak-anak dan kaum ibu di Aceh.

Anak selalu berada dalam posisi yang penting dalam keluarga dan masyarakat. Hampir setiap nilai dan budaya masyarakat memiliki cerita berkenaan dengan posisi, dan perlakuan atas anak. Hampir semua nilai dalam kebudayaan menempatkan posisi anak sebagai momen pengharapan bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Pada bagian ini akan mengurai dalam konteks Aceh, seperti apakah masyarakat membangun konstruksi nilai tentang anak? Bagaimana pula pengalaman lokal, terutama di empat gampong, yakni Lamgirek, Aneuk Paya, Birek dan Gapuy dalam mengelola program anak selama ini? Bagaimana pula hubungan-hubungan sosial terjalin di dalam mengelola isu anak?

Konstruksi dan Nilai Lokal Tentang Anak.

Kondisi paska konflik dan tsunami, anak-anak Aceh sangat membutuhkan perlindungan dalam menjalani keberlangsungan hidupnya. Begitu pula dalam kondisi normal, anak-anak juga membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh kembang secara baik. Hampir semua orang

perlindungan anak di Banda Aceh yang terbentuk sejak tsunami 26 Desember 2004. Jaringan FTR ini terdiri dari Unicef, Child Fund, Save the Children, Lost Children Operation, Muhammadiyah, Kementerian Perempuan, dan Dinas Sosial Provinsi NAD.

tua di Aceh mengorbankan apa saja untuk memberikan perlindungan atas anak-anaknya ketika mengalami keterancaman. Hasrat memberi perlindungan pada anak yang begitu kuat karena kecintaan yang begitu tinggi para orang tua terhadap sang anak. Dalam budaya Aceh, dikenal istilah *aneuk keu ayeum mata*, anak sebagai hiasan mata. Artinya, anak dapat menghapus lelah, menumbuhkan semangat hidup, menenangkan jiwa, mendamaikan hati. Oleh karena itu, anak perlu dijaga dan dipelihara dengan baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pula.³ Dikiaskan demikian karena anak menjadi mahkota idaman bagi keluarga-keluarga di Aceh.

Budaya Aceh menempatkan anak dalam rumah tangga atau keluarga pada dua dimensi alamiah, yaitu: *Pertama*, anak sebagai buah alami (*sunnatullah*), hasil kekuatan rasa kasih sayang suami isteri (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagai *mawaddah* dan *rahmah* Allah SWT untuk memperkuat bangunan hubungan rumah tangga yang rukun damai, bahagia dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islami. *Kedua*, anak sebagai kader penerus generasi, pelindung orang tua dikala lemah dan pelanjut doa (*ritual communication*) manakala orang tuanya meninggal dunia memenuhi panggilan Khalik sebagai penciptanya.⁴

Perspektif budaya masyarakat Aceh tentang anak tidak terlepas dari nilai-nilai tentang anak dalam Islam yang menjadi tuntunan hidup masyarakat. Dalam Al-Qur'an seperti yang termuat dalam Surat Al Kahfi ayat 46 dinyatakan bahwa "Harta dan anak adalah perhiasan dunia". Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana anak menjadi

3 Mukhlisuddin Ilyas, Sehat Ihsan Shadiqin, Lukman Emha, dan Syahrullah, *Praktik Perlindungan Anak : Perspektif Budaya Aceh*, dalam <http://web.acehinstitute.org/AGENDA-/132.html?VivvoSessionId=79830d69497347792efa>, diakses tanggal 04 Februari 2009.

4 Badruzzaman Ismail, *Anak Dalam Adat Aceh*, dalam http://www.acehinstitute.org/opni_opni_badruzzaman_anak_dlm_adat_aceh.-htm, diakses tanggal 04 Februari 2009.

perhiasan dunia, sehingga bagaimana anak sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan yang dimiliki orang tua dalam suatu keluarga, sehingga bagaimana suatu keluarga yang memiliki anak dan menjadikan anak sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan baik dan benar sehingga anak-anak menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, dalam Al-Qur`an, Surat Ali Imran Ayat 14 dinyatakan bahwa “Anak adalah sasaran kecintaan dan perhiasan hidup serta bagian dari unsur kebahagiaan, dijadikan indah pada manusia kecintaan pada wanita dan anak-anak”. Penegasan Al-Qur`an dalam ayat ini menjelaskan bahwa anak harus dijadikan sebagai kecintaan dan dapat menciptakan kebahagiaan sehingga ada perintah untuk mencurahkan kecintaan kepada anak dari orangtua atau keluarga. Hal ini dapat menumbuhkan kecintaan anak yang pada akhirnya kehidupan dengan penuh cinta dan kasih antara sesama.⁵

Nilai-nilai budaya dalam masyarakat Aceh menunjukkan bahwa kehadiran anak dalam keluarga sangat penting sebagai keharmonisan dan kerukunan orang tua. Kehadiran anak tidak saja memberikan rasa damai dalam keluarga, akan tetapi juga memberikan rasa rukun antar keluarga dalam lingkup tali persaudaraan keluarga besar. Anak sebagai buah hati keluarga juga mampu membawa secercah keceriaan dalam keluarga. Kehadiran anak juga mampu memberikan semangat bagi para orang tua dalam membangun kesejahteraan maupun semangat hidup yang lebih baik. Ibaratnya, anak adalah cahaya kehidupan bagi para orang tua dalam membangun sebuah keluarga, sebagaimana diungkapkan oleh keuchik Lhamlom berikut ini :⁶

5 Naskah Akademik Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.

6 Disampaikan dalam pelatihan “Gampong Ramah Anak” di Kecamatan Lhoknga pada tanggal 15 – 23 November 2008.

“anak merupakan aset yang paling berharga di dalam rumah tangga, keberadaan anak dalam gampong merupakan masa depan bagi gampong

Tentu saja, kehadiran anak dalam keluarga sangat diharapkan, terlebih dalam tradisi lokal masyarakat di Indonesia, anak dianggap sebagai sebuah pembawa berkah. “Banyak anak, banyak rejeki”⁷ adalah salah satu kalimat yang sering kita dengar dalam cerita maupun tutur kata sehari-hari dalam masyarakat di belahan bumi Indonesia. Begitu pula dalam pandangan masyarakat Aceh, anak adalah buah hati penjaga kedamaian dalam keluarga. Tanpa bising suara anak, sebuah keluarga kadang terasa sunyi dan senyap. Tingkah laku anak yang lucu, nakal maupun yang aneh-aneh adalah sesuatu keramaian yang diharapkan. Orang tua sangat senang bila mempunyai anak pintar, cerdas dan kreatif. Sangat wajar bila orang tua selalu berharap demikian.

Begitu pula pandangan masyarakat tentang anak dalam keluarga di empat gampong, yakni Gampong Lamgirek dan Aneuk Paya Kecamatan Lhoknga, serta Gampong Birek dan Gapuy Kecamatan Lhoong. Dari Gampong Aneuk Paya, beberapa anggota masyarakat, khususnya Buchari sebagai keuchik, Mochtarudin sebagai sekretaris gampong, dan beberapa tokoh lainnya dari tuhapeut dan para kader Posyandu memberikan pendapatnya bahwa “Anak tidak saja dianggap sebagai buah hati dari hasil perkawinan dalam keluarga. Anak adalah titipan Allah SWT sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa. Anak yang baik adalah patuh pada orang tua, agama dan negara.

7 Banyak anak banyak rejeki adalah ungkapan yang sering diucapkan dalam masyarakat Jawa maupun di Indonesia pada umumnya. Banyak anak banyak rejeki merupakan sebuah simbol ungkapan bahwa dalam sebuah keluarga akan menjadi tidak harmonis dan tidak banyak rezeki yang didapat bila tidak ada kehadiran anak dalam keluarga.

Anak harus mengerti sopan santun dan adat istiadat yang ada". Keinginan para orang tua dalam mendidik anak juga disyaratkan untuk selalu taat beribadah dan juga menjalankan syariat Islam.

Senada dengan pendapat tokoh masyarakat Aneuk Paya, masyarakat di Gampong Lamgirek Kecamatan Lhoknga, juga mempunyai keinginan serupa. Minimal yang harus dimiliki oleh anak adalah taat dan berbakti kepada orang tua serta mampu menjalankan ibadah menurut syariat Islam. Persoalan sopan santun dalam tradisi kehidupan masyarakat Gampong Lamgirek menjadi penting untuk diangkat kembali. Pengaruh media yang berkembang menjadikan seorang anak banyak melupakan tradisi penghormatan terhadap orang tua. Begitu pula dalam menjalankan ibadah, pengaruh pergaulan menjadi perhatian serius. Banyak orang tua mensyaratkan anak terus mempelajari norma-norma masyarakat, khususnya kehidupan sosial kemasyarakatan dengan nafas budaya Islam.

Ibu Syabariah, seorang tokoh perempuan yang selalu menjadi panutan masyarakat Lamgirek dalam mendidik anak-anak dalam mempelajari keagamaan dan kehidupan bermasyarakat, pernah mengatakan bahwa anak harus mendapatkan pendidikan keagamaan yang utama. Sejak dulu persoalan akhlak menjadi nafas utama kehidupan anak menuju jenjang kedewasaan. Peletakan pendidikan keagamaan bisa dilakukan untuk mencegah perbuatan tercela atau minimal sebagai penjaga norma pergaulan anak dari berbagai pengaruh buruk. Ibu Syabariah hingga kini terus melanjutkan pendidikan untuk anak melalui Taman Pendidikan Al Quran (TPA) yang selama ini menjadi penjaga moral untuk anak-anak secara turun temurun di desa Lamgirek. Berikut petikan ungkapan Ibu Syabariah itu:⁸

8 Ibu Syabariah merupakan tokoh perempuan dari Gampong Lamgirek, Kecamatan Lhoknga yang senantiasa membimbing anak-anak dalam pelajaran agama dalam program TPA. Selain

“Ibarat buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, begitu pula mengenai anak, tidak akan berkembang dengan baik bila orang tua tidak mendidik anak dengan baik. Kelak anak juga akan menjadi anak yang berhasil, berbakti pada orang tua dan mempunyai akhlak yang baik. Anak adalah dambaan orang tua di masa depan. Orang tua akan melakukan apapun demi cita-cita anak untuk bisa lebih baik dari pada orang tuanya di kehidupannya kelak. Orang tua, terutama ibu, diharapkan mampu mengelola ekonomi rumah tangga yang bisa mendukung tumbuh kembang anak” .

Cara pandang anak sebagai titipan Allah SWT berimplikasi pada adanya kewajiban para orang tua untuk selalu menjaga anak dari pengaruh yang buruk. Anak sebagai anugerah juga perlu didorong untuk mendapatkan cita-cita mulia yang diinginkannya. Tugas para orang tua dan ulama adalah menjaga dan menjadi penasehat anak untuk tidak masuk ke dalam pergaulan yang bisa merusak cita-cita anak. Contohnya, para orang tua juga memberikan kebebasan anak untuk memilih pendidikan sesuai dengan cita-citanya. Orang tua akan melakukan apapun demi terwujudnya cita-cita anak dan masa depan yang lebih baik. Keinginan untuk mendorong dan mewujudkan anak dalam dalam mewujudkan cita-citanya selalu menjadi hal yang utama di Gampong Lamgirek. Untuk mewujudkan itu, para orang tua berusaha dan bersusah payah, bahkan mau berkorban untuk kepentingan cita-cita anak.

Di Kecamatan Lhoong, khususnya di Gampong Gapuy dan Birek, anak dipandang sebagai aset penting bagi masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat

itu, Ibu Syabariah adalah tokoh perempuan di Gampong Lamgirek yang terlibat aktif sebagai Tuhapeut dalam membangun gampongnya.

kedua gampong tersebut dalam mengatasi persoalan anak paska tsunami. Alokasi anggaran untuk kebutuhan anak adalah utama demi menyelamatkan mereka. Hal ini dilakukan oleh kedua gampong tersebut karena banyaknya anak-anak yang menjadi korban tsunami. Latar belakang perhatian tokoh masyarakat terhadap anak juga didasari pada kekuatan mereka dalam menempatkan anak dalam keluarga, masyarakat dan juga kewajiban mereka terhadap kemanusiaan. Menurut keuchik Usman dari Gampong Gapuy, posisi anak dalam keluarga tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Anak mendapatkan hak yang sama dalam keluarga, mulai dari makanan, pendidikan, kesehatan hingga bentuk perhatian lainnya seperti fasilitas bermain dan sebagainya.

Dalam masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Gampong Gapuy dan Birek khususnya, anak perempuan memperoleh perhatian sangat besar dari keluarga karena bagi mereka anak perempuan harus mendapatkan perlindungan. Perbedaan perlakuan antara anak perempuan dan laki-laki di kedua gampong ini adalah anak perempuan lebih mendapatkan perhatian lebih, khususnya beberapa fasilitas dalam mendukung tumbuh kembang anak perempuan. Sejak dulu, adat di kedua gampong ini memberikan perhatian lebih kepada anak perempuan dengan cara perlakuan khusus. Misalnya, anak perempuan lebih diperhatikan dalam tempat tinggal dan diberi kamar khusus. Sedangkan anak laki-laki bisa berkumpul dalam satu kamar maupun tidur di surau atau meunasah. Perlindungan yang diberikan para orang tua dimaksudkan untuk menjaga anak perempuan dari perbuatan yang tidak baik ataupun pengaruh buruk dari luar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Jumiati berikut ini:⁹

9 Ibu Jumiati adalah kader Posyandu dari Aneuk Paya. Cerita mengenai status anak perempuan dalam keluarga Aceh ini didapat ketika sedang berbincang-bincang di warung kopi miliknya

“Waktu kecil saya dulu, saya memang tinggal sekamar dengan orang tua ataupun kakak perempuan saya ketika tidur karena saya masih belum berani tidur sendiri saat itu. Ketika remaja, semua anak perempuan di keluarga kami mendapatkan kamar satu per satu. Kami memang tidur sendiri-sendiri karena memang mamak kami membangun kamar khusus untuk anak-anak perempuannya. Saudara kami yang laki-laki, bisa tidur satu kamar atau tidur di meunasah dengan teman-temannya. Hingga saat ini setelah saya berkeluarga, kamar tersebut masih menjadi milik saya dan saya bebas kapan saja datang ke rumah dengan keluarga saya, tapi ya tetap di kamar saya itu. Sebelum harta kami dibagi waris, kamar itu tetap menjadi milik saya. Di masyarakat Aceh, anak perempuan adalah pewaris rumah, sedangkan anak laki-laki mendapatkan kebun keluarga”.

Perilaku para orang tua yang sedikit membedakan anak perempuan dalam pergaulan lingkungan di Aceh sejak dulu memang banyak ragam latar belakangnya. Anak perempuan tidak bebas bermain keluar rumah hingga larut malam karena situasi konflik yang ada waktu itu memang membahayakan bagi anak-anak perempuan. Perilaku perlindungan terhadap anak perempuan memang memaksa orang tua untuk tidak membolehkan anak perempuan bisa bebas dalam menentukan lingkup pergaulan. Disadari atau tidak, situasi konflik yang terjadi di Aceh menyebabkan para orang tua terpaksa mengambil tindakan preventif untuk menjaga anak perempuan dari situasi sosial yang memburuk pada waktu itu.

Penempatan anak perempuan dalam keluarga juga diberikan perlakuan khusus. Misalnya, anak perempuan diberikan kamar khusus ketika beranjak remaja. Pemberian

kamar khusus dalam konteks keluarga Aceh bisa dalam bentuk kamar tersendiri atau jika perlu dibangun kamar baru khusus untuk anak perempuan jika dalam keluarga tidak ada kamar lagi tersedia. Bahkan hingga dewasa, kamar khusus ini masih menjadi hak anak perempuan sebelum pembagian warisan dalam keluarga. Pandangan ini tidak terlepas dari konteks keagamaan yang kuat dalam masyarakat Aceh. Konteks pemberian kamar khusus ini adalah proteksi atau pemberian perlindungan anak perempuan yang beranjak dewasa dari segala bentuk gangguan yang sifatnya pelecehan seksual ataupun perlindungan anak perempuan terhadap 'aurat' yang dalam konteks pandangan Islam harus dijaga dengan baik. Perlindungan yang dilakukan terhadap anak perempuan secara khusus karena para orang tua ketakutan bila nanti ada gangguan yang tidak diinginkan, apalagi semasa konflik problem keamanan seperti kontak senjata hampir terjadi setiap hari.

Orang tua juga sangat takut dan malu bila ada anak perempuan bergaul dengan bebas. Pergaulan bebas dalam pandangan masyarakat Aceh bisa diartikan melanggar syariat Islam. Keluarga akan sangat malu bila ada kejadian buruk yang menimpa pada anak perempuan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual maupun tindakan kekerasan yang lain yang menimpa anak perempuan. Perilaku khusus kepada anak perempuan dilakukan dengan ketat karena memang prinsip dasar keagamaan mengharuskan menjaga 'aurat' anak perempuan dan juga perlindungan terhadap situasi sosial dan keamanan. Baik pada masa sebelum konflik, masa konflik hingga paska tsunami, tindakan perlindungan terhadap anak perempuan ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Aceh.

Anak laki-laki tidak mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana anak perempuan. Orang tua memandang anak laki-laki ketika beranjak dewasa lebih bisa mandiri

dan bisa dilepas dalam konteks pergaulan ataupun memilih cita-cita. Kesempatan anak laki-laki untuk berkembang cukup besar dalam bingkai keluarga di Aceh karena laki-laki adalah penerus keluarga untuk mencari nafkah. Pandangan ini juga seperti pada masyarakat di berbagai daerah lainnya di Indonesia, bahwa anak laki-laki adalah harapan keluarga dalam menjunjung tinggi nama baik keluarga maupun masyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mochtarudin berikut ini: ¹⁰

“Sewaktu saya masih kecil, saya terbiasa hidup di luar rumah. Dalam masyarakat Aceh, anak laki-laki terbiasa bergerombol ketika bermain bersama. Surau dan meunasah adalah tempat yang nyaman buat anak laki-laki dalam masyarakat Aceh, baik sebelum konflik maupun semasa konflik. Setelah belajar mengaji, kami terbiasa terus bermain di surau maupun di meunasah. Anak laki-laki juga terbiasa tidur di meunasah. Kebiasaan ini banyak berlaku di banyak gampong dalam kehidupan anak laki-laki. Orang tua kami, tidak ambil pusing ketika kami tidur bersama di meunasah. Berbeda dengan anak perempuan, mereka tidak boleh ke luar rumah pada malam hari dan diberikan kamar khusus ketika beranjak dewasa. Banyak masalah yang muncul, selain soal keamanan semasa konflik, para orang tua juga menjaga anak perempuan dari gangguan orang tak bertanggung jawab”.

Tindakan yang berbeda orang tua terhadap anak laki-laki dalam masyarakat Aceh memang tidak begitu ketat dalam perlindungan tumbuh kembangnya dibandingkan dengan anak perempuan. Anak laki-laki biasa dilepas

¹⁰ Mochtarudin sekararang menjabat sebagai sekretaris Gampong Aneuk Paya, Kecamatan Lhoknga. Cerita di atas adalah gambaran semasa kecilnya bergaul dengan teman-temannya di gampong.

dalam pergaulan di lingkungan masyarakat, namun tentu saja tetap mendapatkan perhatian. Para orang tua sedikit banyak melepas anak laki-laki dalam pergaulan dengan membolehkan tidur di surau, meunasah maupun di tempat lainnya.

Keleluasaan yang diberikan kepada anak laki-laki yang cukup luas itu juga memberikan dampak yang baik bagi pergaulannya. Anak laki-laki lebih bisa beragaul secara luas dengan para teman-temannya. Rasa solidaritas yang tinggi dan keakraban menjadi terasa lebih dalam konteks pertemanan maupun persaudaraan. Solidaritas inilah yang bisa menjadi modal sosial ke depan bagi para generasi penerus gampong dan keluarga di masa depan.

Pengalaman Mengelola Program untuk Anak

Dari keempat gampong yang menjadi sasaran program, dua gampong di Kecamatan Lhoong terkena bencana



Anak-anak Aceh hidup dalam suasana religius.

tsunami dan dua gampong di Kecamatan Lhoknga tidak terkena dampak langsung tsunami. Paska tsunami, ada perbedaan kondisi masyarakat di keempat gampong. Banyak terjadi korban jiwa di Gampong Birek Kecamatan Lhoong. Jumlah penduduk Gampong Birek sesudah musibah tsunami sebanyak 73 KK dan 169 jiwa (Data diambil dari hasil *assessment* AIPRD-LOGICA tahun 2006.¹¹), sedangkan data jumlah penduduk sebelum bencana sulit diketahui karena dokumen yang tersedia hilang terkena bencana.

Gambaran angka seperti di atas menunjukkan banyaknya korban jiwa yang dialami oleh Gampong Birek ketika terjadi bencana tsunami. Menurut warga Gampong Birek, kondisi gampong berbentuk hamparan luas dengan pemukiman yang padat sehingga menyebabkan warga banyak menjadi korban karena tidak sempat menyelamatkan diri. Berdasar informasi penduduk, sebelum tsunami Gampong Birek mempunyai banyak penduduk, bahkan di atas 1.000 jiwa. Tetapi, paska tsunami hanya tersisa 73 KK dengan 169 Jiwa dan hanya 1 anak saja.

Di Gampong Gapuy Kecamatan Lhoong, lebih banyak warganya yang selamat dari tsunami karena mereka bisa cepat diri naik ke bukit yang berada tepat di belakang gampong ini. Data yang ada setelah tsunami adalah 71 KK dan 216 jiwa (Data diambil dari hasil *assessment* AIPRD LOGICA tahun 2006.¹²), data jumlah penduduk sebelum tsunami tidak bisa diketahui karena hilang.

Berbeda dengan Gampong Birek dan Gapuy, Gampong Aneuk Paya dan Lamgirek di Kecamatan Lhoknga masih utuh dan relatif tidak ada korban. Menurut keterangan saat *assessment*, korban memang ada tetapi para warga yang sedang pergi ke luar gampong, misalnya sedang berkunjung

11 Sumber: Buku Profil Gampong Birek, Kecamatan Lhoong yang diterbitkan oleh AIPRD LOGICA, Juli 2006.

12 Sumber : Buku Profil Gampong Gapuy, Kecamatan Lhoong yang diterbitkan oleh AIPRD LOGICA, Juli 2006.

ke keluarga saat terjadi tsunami dan itupun sangat sedikit. Data yang ada sulit ditunjukkan karena tidak terkoleksi dengan baik di kedua gampong ini. Keterangan yang didapat hanya menunjukkan bahwa masyarakat di kedua gampong ini masih utuh karena tidak terjadi bencana.

Kondisi empat gampong yang ada cukup berbeda dalam banyak hal. *Pertama*, gampong berbeda dalam kondisi wilayah geografis. Gampong di Kecamatan Lhoknga (Aneuk Paya dan Lamgirek) merupakan gampong yang letaknya agak jauh dari pantai. Gampong ini terhalang oleh bukit di sebelahnya yang berhadapan dengan Samudera Indonesia. Adanya bukit di bekakang yang berhadapan dengan pantai inilah yang menyelamatkan ke dua gampong ini dari bencana tsunami. Gampong Aneuk Paya dalam kondisi utuh, sementara di Gampong Lamgirek ada beberapa rumah yang terendam, dan tidak lebih dari 6 rumah sehingga tidak banyak mengalami kerusakan akibat tsunami.

Kondisi yang berbeda dialami oleh ke dua gampong di Kecamatan Lhoong, yaitu gampong Birek dan Gapuy. Gampong ini terletak persis di pinggir Samudera Indonesia yang kemudian menyebabkan gampong mengalami kehancuran luar biasa. Tidak satupun rumah yang utuh di kedua gampong ini, habis luluh lantak ditelan gelombang tsunami. Di tengah kehancuran ini, ada masjid di Gampong Birek yang masih utuh tegak berdiri tak tergoyahkan.

Kedua, dalam konteks pekerjaan juga mempengaruhi dinamika masyarakat di keempat gampong ini. Posisi Gampong Aneuk Paya dan Lamgirek yang terletak di pinggir kaki bukit menjadikan masyarakat kedua gampong ini lebih banyak berprofesi sebagai petani. Hamparan sawah dan kebun yang luas dan subur adalah lahan bagi masyarakat untuk mata pencaharian. Kultur agraris adalah ciri khas masyarakat Aneuk Paya dan Lamgirek. Hanya saja, Aneuk Paya lebih dekat akses ke jalur perdagangan antara

Banda Aceh dan Meulaboh sehingga sebagian masyarakat juga hidup dari sektor perdagangan. Di Aneuk Paya, terdapat lokasi pasar yang cukup strategis dan menjadi tumpuan sebagian masyarakatnya untuk berdagang. Hal ini berbeda dengan Birek dan Gapuy yang masyarakatnya lebih banyak menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Sejak kecil anak-anak di kedua gampong ini akrab dengan laut, dan ketika mereka besar banyak yang menjadi nelayan sebagai pilihan lapangan pekerjaan. Masyarakat di kedua gampong ini banyak yang memiliki perahu, karena itu mereka sulit sekali menetap di gampong karena harus berlayar seharian di laut. Kadangkala mereka beristirahat ketika ombak di laut tidak ramah. Selebihnya, mereka ada di laut untuk mencari ikan.

Ketiga, dalam konteks kehidupan bermasyarakat terdapat perbedaan karakter yang cukup kuat. Masyarakat di Gampong Aneuk Paya dan Lamgirek lebih mapan dalam menjalankan tradisi musyawarah mufakat karena seringnya mereka berkumpul. Pekerjaan sebagai petani membuat masyarakat di sini mudah berkumpul karena tidak banyak aktivitas ke luar gampong. Sedangkan di Birek dan Gapuy, masyarakat sangat sulit sekali berkumpul karena pekerjaan sebagai nelayan mengharuskan mereka meninggalkan kampung. Bisa seharian, bahkan bisa berhari-hari jika memang jarak tempuh melautnya cukup jauh. Pekerjaan sebagai nelayan sedikit banyak mempengaruhi corak kehidupan bermasyarakat. Masyarakat di kedua gampong ini sangat sulit untuk berkumpul dan bermusyawarah. Seperti di Gampong Gapuy, karena aktivitas di laut cukup padat, masyarakat lebih cenderung memilih kerja di laut daripada berkumpul untuk mencoba belajar berdemokrasi. Ukuran sederhana bisa dilihat dari beberapa kali undangan pertemuan yang dilakukan selalu sepi dari masyarakat karena mereka tengah melaut dan tidak bisa cepat kembali ke rumah. Sedangkan di Birek, masyarakat lebih mudah

bisa berkumpul jika koordinasi yang dilakukan cukup baik. Tetapi, mereka yang berpartisipasi juga tidak banyak karena faktor pekerjaan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berhubungan dengan dunia luar pun berbeda. Walaupun berada satu kabupaten, Aneuk Paya dan Lamgirek lebih dekat dengan kota Banda Aceh sebagai pusat ibukota propinsi, jika dibandingkan dengan Birek dan Gapuy. Apabila naik sepeda motor, kira-kira 20 menit sudah sampai ke kota Banda Aceh. Kedekatan jarak inilah yang membuat masyarakat di kedua gampong ini sangat terbuka dan mudah mendapatkan akses cukup banyak dari kota. Khususnya Aneuk Paya, letaknya strategis yang dilalui jalur antara Banda Aceh dan Meulaboh sehingga gampong ini berkembang perdagangannya. Sedangkan di Gampong Lamgirek, karena kedekatannya dengan pegunungan dan hamparan persawahan maka konsentrasi masyarakatnya lebih banyak berdagang maupun bergerak di sektor jasa lainnya, di samping bekerja di sektor pertanian.

Birek dan Gapuy di Kecamatan Lhoong, karena kedudukannya di pinggir laut, maka dominasi pekerjaan masyarakat ini adalah nelayan. Ada sedikit pertanian, akan tetapi sektor pertanian bukan menjadi hal yang pokok karena tidak banyak memberi keuntungan. Di Gampong Birek, terdapat dermaga perahu yang cukup besar dan menjadi pusat kegiatan para nelayan bagi Gampong Birek dan gampong-gampong lain di sekitarnya. Kehidupan nelayan ini lah yang membentuk karakter masyarakat di kedua gampong ini sering pergi ke luar rumah, terutama bagi para kaum lelakinya. Jika melaut, mereka bisa sehari-hari berada di tengah laut dan jarang bisa berkumpul dengan keluarga. Oleh karena itu, peran para perempuan di kedua gampong ini sangat besar dalam mengawal tumbuh kembang anak. Pada waktu tsunami terjadi, gampong ini rusak 100% bangunan infrastruktur fisiknya.

Kedua gampong ini terletak cukup jauh dengan pusat ibu kota propinsi dan juga ibu kota kabupaten. Gampong Birek dan Gapuy adalah gampong yang berada di kecamatan terjauh dengan Ibu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Jarak tempuh ke Kota Banda Aceh sekitar 1,5 jam perjalanan dan jika ingin ke pusat kota Kabupaten Aceh Besar (kota Jantho) bisa 2,5 hingga 3 jam perjalanan. Walaupun berada pada jalur Banda Ace – Meulaboh, kondisi kedua gampong ini cukup terisolasi dengan akses luar. Hal ini dibuktikan dengan minimnya kualitas pendidikan formal di kedua gampong ini.

Kondisi minimnya kualitas lulusan pendidikan formal di kedua gampong ini memang banyak faktor. *Pertama*, sebelum konflik, kedua gampong ini bisa dikatakan terisolasi dari akses apapun. Kondisi gampong yang berada di pinggir laut, jauh dari akses ibu kota dan perkembangan lalu lintas ekonomi menyebabkan kedua gampong ini sulit berkembang dari sisi ekonomi. *Kedua*, semasa konflik gampong ini juga menjadi bagian dari area konflik yang cukup kuat karena posisinya memang jauh dari perkotaan dan bisa dijadikan daerah basis konflik. Dari sisi inilah masyarakat tidak bisa mengakses pendidikan formal dengan baik karena konflik yang terjadi menyebabkan anak-anak tidak berani masuk sekolah formal dengan lancar. *Ketiga*, kedua gampong ini sulit mendapatkan bantuan pembangunan, khususnya infrastruktur fisik akibat konflik yang mendera maupun karena jarak jangkauan yg cukup jauh dan akses masyarakat lemah terhadap pembangunan. *Keempat*, karena konflik yang terus melanda dan hancurnya kehidupan ekonomi, maka para orang tua juga membiarkan anak-anak untuk tetap tinggal di rumah dengan kegiatan mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikan ini ternyata lebih besar untuk membantu pendapatan ekonomi rumah tangga. Akibatnya, ketika anak-anak putus sekolah dan mencari ikan, maka orang tua membiarkan begitu saja anak-anak untuk

tidak pergi ke sekolah dan belajar menjadi nelayan. Dalam penjelasannya, Jupri menegaskan sebagai berikut:¹³

Semasa konflik, saya tidak berani masuk sekolah dengan bebas, apalagi bermain cukup jauh dari gampong. Setiap jengkal jalan, atau bisa dikatakan jarak 200 m hingga 1 km pasti ada pos pemeriksaan oleh aparat. Sewaktu saya kecil, saya sangat takut ada peluru nyasar yang setiap saat bisa salah sasaran. Oleh orang tua kami, jika ada kontak senjata, kami tidak dibolehkan bermain di luar rumah, apalagi sekolah. Tidak heran di Kecamatan Lhoong ini, anak-anak bisa lulus sampai ke jenjang sekolah SMP sudah bisa dikatakan hebat. Kalau kami mau bisa lulus sekolah, maka orang tua kami mengirim kami ke pesantren atau ke kota untuk sekolah di sana yang relatif lebih aman. Kami juga tidak berani bermain jauh dari gampong, pernah ada kejadian kontak senjata, para pemuda dan bapak-bapak di gampong dihajar oleh aparat hanya karena dekat dengan lokasi kontak senjata. Anak-anak sangat takut keluar rumah karena bisa jadi salah sasaran.

Dalam hal aksesibilitas pendidikan, terdapat perbedaan yang mencolok antara Gampong Birek dan Gapuy di Kecamatan Lhoong dibandingkan dengan kondisi di Gampong Aneuk Paya dan Lamgirek di Kecamatan Lhoknga. Akses anak-anak untuk mendapatkan pendidikan sangat terbuka lebar walaupun konflik terjadi di NAD. Kedekatan akses kedua gampong dengan dunia pendidikan dirasakan betul. Bahkan, kadangkala konflik yang terjadi tidak membuat

13 Jupri adalah seorang tokoh pemuda di Gampong Birek Kecamatan Lhoong. Cerita ini dikisahkan ketika Jupri masih kecil. Sekarang Jupri menjabat sebagai sekretaris Gampong Birek dan terlibat aktif dalam kegiatan advokasi gampong yang peduli pemenuhan hak anak.

para orang tua patah semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Berikut ungkapan Mochtarudin:

Kami tetap sekolah walaupun konflik terjadi di gampong kami. Akses sekolah yang dekat, membuat kami bisa sekolah dengan baik. Bahkan saya bisa sekolah agak jauh dari gampong untuk memilih sekolah yang favorit seperti keinginan saya. Saya masih ingat setiap hari di antar oleh bapak ke sekolah hingga kelas 4 SD, saya sudah berani naik labi-labi (mobil angkot) untuk ke sekolah sendiri.

Gambaran yang diceritakan oleh Mochtarudin seperti di atas juga terjadi di Gampong Lamgirek. Para orang tua tetap semangat dalam mendidik anak-anak agar lebih bisa maju dan mampu membangun masa depannya sendiri dan lebih baik daripada yang telah dicapai oleh para orang tua. Walaupun konflik terjadi, para orang tua tetap saja dengan kesadaran tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya dan mengantar setiap hari ke sekolah. Kesadaran masyarakat di Gampong Aneuk Paya dan Lamgirek memang cukup tinggi karena akses terhadap pendidikan sangat mudah. Begitu juga fasilitas pendidikan yang banyak membuat para orang tua banyak pilihan dalam menentukan anaknya mau sekolah di mana sesuai dengan pertimbangan dan keinginan anak.

Bidang kesehatan anak sebagai syarat tumbuh kembang anak juga memperoleh perhatian. Tradisi kuat dalam mendorong anak sehat di keempat gampong ini telah lama dilakukan. Walaupun konflik mendera, kegiatan ibu-ibu dalam organisasi PKK dan Posyandu tetap jalan. Bahkan, kegiatan PKK dan Posyandu pada masa sebelum konflik dan pada saat konflik lebih baik jika dibandingkan dengan paska tsunami. Kegiatan PKK dan Posyandu untuk kesehatan anak pada masa konflik tetap bisa jalan dengan baik

dalam kerangka program pemerintah. Berjalannya kegiatan Posyandu ini karena memang masyarakat, khususnya para ibu-ibu di gampong, sangat membutuhkan program ini. Hal ini disebabkan akses kesehatan yang cukup jauh dari pusat layanan kesehatan dan faktor keamanan di jalan. Para ibu-ibu lebih mengandalkan kegiatan Posyandu di gampong karena merasa lebih nyaman daripada harus jauh-jauh ke pusat layanan kesehatan yang ada di Puskesmas karena faktor keamanan di perjalanan yang harus melewati banyaknya pos-pos keamanan yang dijaga oleh tentara. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh keuchik Krueng Kala dalam pelatihan “Gampong Ramah Anak” di Kecamatan Lhoong :

Kegiatan Posyandu di Gampong Krueng Kala lebih maju dulu sebelum terjadi tsunami karena perhatian pemerintah cukup baik. Posyandu bisa jalan dengan baik di masa konflik karena memang menjadi satu-satunya program pemerintah dalam melayani kesehatan masyarakat di gampong. Ibu-ibu lebih senang berkegiatan di gampong karena merasa tidak aman di perjalanan jika ingin memeriksakan anak atau mengerti program kesehatan anak akibat kondisi konflik yang tidak memungkinkan untuk berjalan cukup jauh. Paska tsunami, kegiatan Posyandu tidak begitu berjalan lancar, entah karena para ibu yang banyak jadi korban Tsunami atau memang sekarang ini kurang tertata dengan baik.

Bila dilihat di keempat gampong, memang tampak perbedaan perilaku masyarakat dalam mengelola program anak, baik semasa pra konflik, konflik dan paska tsunami. Di Gampong Aneuk Paya dan Lamgirek, kekuatan para pemuda dan pemudi bisa menyatu dengan para ibu-ibu yang menjadi relawan Posyandu atau lebih sering disebut



Keceriaan anak-anak Aceh jangan sampai terenggut.

kader Posyandu. Para pemuda dan pemudi, khususnya pemudi di kedua gampong ini bisa menjadi relawan yang baik dalam mendorong keberlanjutan untuk mengurus kegiatan di PKK dan Posyandu. Dilihat dari jejak langkah kegiatan paska tsunami, banyak pemudi yang terlibat di kedua gampong ini untuk turut serta menjadi kader Posyandu.

Wajar jika para pemudi terlibat aktif menjadi kader Posyandu di Kecamatan Lhoknga karena memang kondisinya memungkinkan. Berbanding terbalik dengan kondisi di Kecamatan Lhoong, para kader posyandu lebih banyak didominasi oleh para kaum ibu karena memang merekalah yang punya kepentingan langsung terhadap anak-anak mereka. Kesadaran untuk mengelola Posyandu memang cukup rendah. Persoalan utamanya terletak pada sumber daya manusianya, sebagaimana yang diungkapkan oleh

Nurlia berikut ini:¹⁴

Para ibu-ibu di Gapuy bisa membaca dan berbahasa Indonesia saja kami sudah cukup bersyukur. Dulu sebelum tsunami, masyarakat sulit untuk bisa berbahasa Indonesia karena memang akses luar apapun sangat tertutup dari Gapuy. Dampaknya adalah para ibu tidak bisa belajar dengan baik, bahkan berbahasa Indonesia sekalipun tidak bisa lancar dengan baik. Apalagi bila para ibu-ibu yang tersisa paska tsunami ini diharuskan bisa mengelola Posyandu, sangat susah kayaknya.

Lemahnya sumber daya manusia di Gampong Gapuy dan Birek adalah gambaran bagi lemahnya pengelolaan program Posyandu untuk mendorong kesehatan anak, khususnya dalam manajemen Posyandu. Dengan adanya sedikit kader, bahkan yang tersisa untuk menjalankan program Posyandu, para kaum ibu di kedua gampong ini tetap bersemangat dalam menjalankannya. Dulu sebelum bencana, kegiatan Posyandu memang dipusatkan di meunasah sebagai tempat kegiatan masyarakat. Sekarang berbeda, paska bencana kegiatan Posyandu memang tidak semaju dulu ketika sebelum bencana karena peserta kegiatan Posyandu berkurang drastis. Tetapi, semangat dalam menjalankan program kesehatan untuk anak tetap jalan dengan kekuatan yang tersisa.

Pengalaman keempat gampong dalam mengelola program anak memang relatif berbeda dengan kondisi

14 Nurlia adalah kader Posyandu di Gampong Gapuy. Di gampong ini, hanya sedikit orang yang bisa menikmati pendidikan hingga tamat SLTA atau perguruan tinggi. Bersama rekannya Ainul, Nurlia termasuk bagian yang bisa menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi dan SLTA yang kemudian menjadi sumber daya manusia yang paling diandalkan untuk memimpin kader Posyandu.

dan latar belakang sosial masyarakat yang berbeda pula. Corak agraris yang kental di Gampong Aneuk Paya dan Lamgirek Kecamatan Lhoknga serta keutuhan masyarakat paska tsunami membuat gampong ini mudah berkoordinasi dan bekerja dengan siapa saja. Begitu pula latar belakang gampong yang terbuka untuk berhubungan dengan dunia luar membuat gampong ini mudah dalam membangun akses terhadap dunia luar, khususnya dalam program paska bencana.

Pengalaman masyarakat di gampong lainnya, Birek, Lamgirek dan Aneuk Paya tidak jauh berbeda dengan Gapuy. Terutama Gampong Birek yang letaknya dekat dengan Gampong Gapuy. Gampong Birek dalam konteks pemberdayaan anak-anak juga mengalami hal yang sama. Selain konflik yang berkepanjangan, gampong ini habis terkena tsunami.

Kondisi Gampong Birek dan Gapuy, sebelum intervensi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh LSM/NGO, sangat memprihatinkan. Kehancuran yang menerpa gampong-gampong ini menyebabkan masyarakat mengalami kelumpuhan aktivitas. Masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Gampong Gapuy lumpuh saat itu. Jika tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun LSM/NGO, gampong ini tidak bisa berbuat apa-apa karena memang masyarakat tidak mempunyai modal sama sekali. Hanya modal manusia yang tersisa sajalah, itupun tidak berdaya dengan kondisi seperti itu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Usman, keuchik Gampong Gapuy :

Saya ini adalah keuchik yang disebut pemimpin air mata. Saya sebagai pemimpin masyarakat hanya bisa melihat masyarakat saya berlimpah air mata selama bencana tsunami melanda gampong kami. Anak-anak saya habis sama sekali, walaupun demikian, saya harus tegar membawa gampong kami ini

*untuk bangkit dan berdiri kembali walaupun tidak
ada sama sekali mata air kehidupan waktu itu.*

Kondisi anak paska tsunami sangat berbeda antar daerah satu dengan lainnya. Pada gampong yang tidak terkena tsunami kondisi anak-anak relatif normal dan tidak banyak perubahan yang terjadi, baik secara sosial maupun dalam konteks perubahan lingkungan. Seperti terlihat di Gampong Lamgirek dan Aneuk Paya Kecamatan Lhoknga, kondisi anak di kedua gampong ini tetap normal seperti sedia kala karena tidak banyak perubahan sosial dan lingkungan yang terjadi akibat dampak bencana tsunami. Normal dalam arti tidak mengalami banyak perubahan, dari sisi fasilitas yang mereka terima, kondisi lingkungan dan sosial yang tidak banyak berubah. Hanya saja, fasilitas anak memang tidak banyak tersedia karena paska konflik di Aceh, baik pemerintah maupun masyarakat belum sempat membangun fasilitas untuk anak, fasilitas bermain maupun fasilitas layanan pendidikan informal lainnya.

Lamgirek dan Aneuk Paya di Kecamatan Lhoknga adalah contoh gampong yang bisa dikatakan tidak terkena tsunami. Tidak ada korban di kedua gampong ini. Kondisi anak-anak normal, dalam artian semua kebutuhan anak masih lengkap seperti layaknya dulu sebelum tsunami. Paska bencana, baru kemudian dibangun arena tempat bermain, bangunan TPA, maupun fasilitas lainnya untuk anak masih lengkap walaupun masih sangat sederhana. Dibangunnya fasilitas anak-anak maupun masyarakat lainnya sebenarnya lebih disebabkan bangunan yang ada tidak memadai dan adanya kesempatan bantuan dari banyaknya bantuan internasional yang masuk ke gampong ini.

Bangunan lama yang dibangun ketika masa konflik sudah dianggap tidak representatif lagi untuk tempat berkumpulnya warga masyarakat maupun kegiatan anak-anak. Selain itu, bantuan dari berbagai NGO nasional

memang mengalir juga ke gampong ini walaupun tidak terkena bencana tsunami. Seperti di Gampong Lamgirek, NGO internasional membantu membangun kantor pemerintah gampong, Posyandu dan meunasah yang lebih baik dan lebih besar. Peluang ini dimanfaatkan oleh pemerintah gampong dan masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur gampong.

Di Gampong Aneuk Paya, semangat masyarakat dalam membangun tempat berkumpulnya warga juga tidak kalah. Melalui program pemerintah Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), masyarakat membangun meunasah baru karena bangunan meunasah lama telah mulai rusak. Dana PPK dengan tambahan swadaya masyarakat ternyata bisa digunakan untuk membangun meunasah yang lebih besar dan lebih baik. Bangunan meunasah baru menjadi yang terbaik di kecamatan Lhoknga. Kekuatan swadaya masyarakat Aneuk Paya terjaga karena partisipasi yang kuat. Selain itu, masyarakat di gampong ini masih utuh karena tidak terkena bencana tsunami.

Keceriaan anak di kedua gampong ini terlihat lebih menonjol dan anak-anak bisa bercanda ria tawa secara lepas. Ekspresi anak tampak terlihat lepas penuh dengan wajah ceria khas anak-anak. Terlihat pula dalam *assessment* anak yang dilakukan oleh IRE Yogyakarta dan Gita Pertiwi di Gampong Lamgirek dan Aneuk Paya yang lebih meriah diikuti oleh anak-anak.

Hal ini berbeda dengan kondisi anak di gampong yang terkena tsunami. Birek dan Gapuy adalah dua gampong di Kecamatan Lhoong yang menjadi sasaran tsunami. Kondisi anak-anak di kedua gampong ini cenderung habis paska tsunami. Di gampong Birek, anak usia sekolah SD hanya tersisa satu, anak usia SLTP dan SLTA tidak lebih dari lima orang, sedangkan anak-anak balita menjadi korban semuanya dan tidak ada yang selamat.

Tidak jauh berbeda dengan Birek, Gampong Gapuy

di Kecamatan Lhoong mengalami hal yang sama. Hanya saja masih lebih banyak anak-anak yang selamat dari tsunami dibandingkan dengan Birek. Anak-anak yang selamat disini sudah menginjak remaja saat ini, namun wajah trauma yang ditampilkan oleh mereka masih saja menyisakan kenangan tsunami. Pengalaman anak-anak yang selamat dari tsunami membuat mereka selalu merasa lingkungan yang ada mengancam.

Begitu pula, berbagai fasilitas yang dimiliki untuk anak di kedua gampong ini paska tsunami sangat minimal. Kondisi yang ada memprihatinkan. Di Gampong Birek sendiri, program masyarakat adalah “mengadakan anak”, sebagaimana diungkapkan oleh T. Syafriansyah : ¹⁵

Gampong Birek dulu terkenal dengan anak-anak yang cantik, lincah dan banyak terkenal di pelosok kecamatan Lhoong. Setelah tsunami, generasi kita tidak ada yang tertinggal, khususnya anak-anak. Karena itu, para orang tua di sini banyak yang kemudian menikah secepatnya dan kemudian mempunyai keturunan lagi. Ini program yang dimaksud “mengadakan anak”, karena anak-anak kami telah tiada. Gampong Birek, katagori anak-anak sekarang ini didominasi oleh usia di bawah lima tahun, atau lahir paska tsunami. Kami sekarang sekuat tenaga untuk membangun gampong dengan langkah pertama adalah membangun generasi baru kami, yaitu anak-anak.

15 T. Syafriansah adalah tokoh masyarakat (mantan sekretaris gampong) Birek. Dalam ungkapanannya, beliau mengenang Gampong Birek yang penuh dengan keceriaan anak-anak. Gampong Birek dulu adalah gampong padat dan penuh dengan canda tawa anak-anak. Tetapi, paska tsunami anak-anak bisa dikatakan tidak ada yang tersisa.

Pertumbuhan anak-anak baru yang lahir pasca tsunami sangat memprihatinkan, tidak banyak fasilitas yang bisa menunjang pertumbuhan anak. Fasilitas di sini adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan hingga kondisi lingkungan yang memang tidak ramah terhadap anak. Di bidang kesehatan, anak-anak dan ibu-ibu belum begitu banyak mendapatkan fasilitas kesehatan. Seperti ketika akan melahirkan, jarak antara gampong dan tempat layanan kesehatan cukup jauh. Belum lagi jika ada masalah melahirkan, harus dibawa hingga ke Kota Banda Aceh yang jarak tempuhnya hingga hampir dua jam perjalanan dan menempuh jalan yang rusak akibat tsunami dan belum selesai diperbaiki.

Persoalan pendidikan juga tidak jauh berbeda. Di Gampong Birek dan Gapuy, anak-anak belum banyak mendapatkan fasilitas pendidikan informal, terutama untuk anak usia prasekolah. Tidak ada *play group* maupun taman kanak-kanak di kedua gampong ini. Praktis persoalan pendidikan anak-anak usia prasekolah belum banyak yang memperhatikan. Pendidikan informal seperti Taman Pendidikan Al-Quran berjalan tersendat. Selain tidak adanya guru ngaji, tidak ada pula fasilitas gedung TPA bagi anak-anak.

Persoalan anak jika tidak segera mendapatkan perhatian, menyebabkan anak mengalami bencana yang cukup parah secara lebih lanjut. Bencana tsunami di NAD memang banyak menyita perhatian banyak kalangan, khususnya program pemulihan, baik *emergency* maupun *recovery* sebagai tindakan penyelamatan dan keberlanjutannya bagi anak-anak. Khususnya masyarakat setempat, banyak melakukan penyelamatan bagi anak-anak. Bagi gampong yang tidak terkena bencana, seperti di Gampong Aneuk Paya dan Lamgirek di Kecamatan Lhoknga, memang tidak banyak terjadi korban pada anak-anak sehingga di kedua gampong ini memang tidak banyak program penelama-

tan bagi anak-anak pada tahapan *emergency phase*. Seperti yang dikatakan oleh Mochtarudin¹⁶ bahwa anak-anak cukup dikumpulkan di meunasah bersama para orang tua mereka. Hanya tindakan penenangan dan perlindungan saja yang dilakukan karena memang bencana tsunami tidak membahayakan bagi gampong yang tidak terkena bencana. Paska bencana, dilakukan berbagai tindakan untuk tetap menjaga psikis anak agar tidak mengalami stress dan memburuknya kesehatan berkepanjangan karena keterbatasan *stock* makanan dan obat-obatan. Begitu pula pada Gampong Lamgirek, tindakan untuk anak-anak sama seperti yang dilakukan oleh Gampong Aneuk Paya.

Masyarakat di gampong yang terkena bencana harus bekerja keras untuk pemulihan bagi anak-anak. seperti yang terjadi di Gampong Birek. Saat terjadi bencana, Gampong Birek tidak banyak berbuat apa-apa karena lokasi gampong yang terletak sangat dekat dengan laut. Anak-anak yang menjadi korban memang tidak bisa diselamatkan, karena para orang tua sendiripun tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Barulah paska tsunami, para orang tua yang tertinggal membangun program “membuat anak” seperti yang diungkapkan oleh para ibu-ibu dan bapak-bapak di gampong ini. Program “membuat anak” adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk keberlanjutan generasi di Gampong Birek karena hanya satu anak yang selamat dalam bencana. Para orang tua kemudian banyak yang menikah kembali dan segera “membuat anak”.

16 Mochtarudin adalah tokoh muda dari Gampong Aneuk Paya yang sekarang menjabat sebagai sekretaris gampong. Dalam konteks *emergency phase*, Mochtarudin mengatakan bahwa tindakan masyarakat untuk penyelamatan anak-anak hanya diprioritaskan sebatas penenangan dan mengumpulkan anak-anak dalam suatu tempat bersama para orang tua. Sementara para orang tua terus mengupayakan bantuan berupa makanan dan obat-obatan untuk menjaga kesehatan anak-anak.

Anak-anak yang kemudian lahir paska tsunami inilah yang menjadi perhatian serius oleh masyarakat Gampong Birek. Program kesehatan dan perumahan adalah yang pertama kali dilakukan. Dengan bantuan pemerintah maupun NGO internasional, program “membangun anak” bisa cepat dilakukan. Para orang tua banyak menikah setelah perumahan yang ada selesai dibangun. Begitu pula yang terjadi di Gampong Gapuy, bagi keluarga dan anak-anaknya tidak terselamatkan mereka banyak menikah kembali dan kemudian cepat punya anak. Seperti yang diungkapkan oleh Nurlia, tokoh perempuan di gampong Gapuy ini menceritakan bahwa keluarga yang tidak terselamatkan kemudian cepat-cepat menikah karena keinginan punya anak cukup besar sebagai keberlanjutan generasi mereka.

Peran pemerintah tidak pula ketinggalan. Dalam mempercepat pemulihan khususnya untuk anak-anak, pemerintah banyak melakukan program kesehatan dan pendidikan. Program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan kader-kader Posyandu di setiap gampong yang kemudian dikoordinasikan dengan Puskesmas yang ada di tingkat kecamatan. Seperti di Kecamatan Lhoong, Puskesmas setiap bulannya mengadakan pertemuan dengan para kader kesehatan, khususnya Posyandu untuk mengecek dan melakukan tindakan tertentu bila ada persoalan kesehatan anak di tingkat gampong. Koordinasi antara kader Posyandu dan Puskesmas hingga saat ini masih terjalin dengan baik dengan adanya pertemuan rutin setiap bulannya dan tunjangan intensif yang diberikan kepada para kader Posyandu.

Pemerintah Daerah juga menempatkan para bidan desa di setiap gampong yang mempunyai Polindes (poliklinik desa). Dalam program ini, para bidan tinggal minimal tiga hari di gampong untuk melakukan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, khususnya untuk anak-anak,

ibu hamil dan ibu melahirkan. Bidan desa tinggal dan menetap pada Polindes yang telah tersedia. Bagi gampong yang tidak mempunyai Polindes, mereka bisa melakukan layanan kesehatan gratis di Polindes terdekat.

PLAN International dalam konteks *recovery* untuk anak tidak pula ketinggalan. PLAN International banyak membantu program anak-anak, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada masa *emergency phase*, PLAN International membangun posko-posko kesehatan yang digunakan untuk tindakan penyelamatan bagi anak-anak. Beberapa program yang dilakukan adalah membangun posko darurat, makanan tambahan untuk mengatasi gizi buruk saat bencana, kesehatan anak, kesehatan lingkungan, membangun gedung Polindes, membangun gedung Posyandu dan pemberdayaan kader Posyandu untuk keberlanjutan program anak-anak.¹⁷

Program layanan untuk anak yang dilakukan oleh PLAN International, khususnya di gampong di Kecamatan Lhoong dan Lhoknga, bisa dilihat secara nyata. Untuk program anak-anak pada masa *emergency phase*, layanan kesehatan pada posko yang dibangun dilakukan. Begitu pula dengan program pendidikan kader Posyandu dan Polindes, khususnya untuk pengelolaan Posyandu dan Polindes sebagai layanan dasar kesehatan masyarakat. Para kader diberi berbagai pendidikan dan keterampilan dalam pengelolaan Posyandu.

Program-program yang dilakukan seperti pendataan anak-anak, pendataan fasilitas anak di gampong hingga program pemeriksaan anak, dilakukan oleh Plan International melalui kerjasama dengan pemerintah daerah.

17 Dapat dilihat secara lengkap pada buku RANUP LAMPUAN ACEH yang diterbitkan oleh PLAN International. Disebutkan di sini, PLAN International bekerja sejak *emergency phase* hingga saat ini, mulai dari tindakan penyelamatan, *recovery* anak hingga pendidikan kader dan tokoh masyarakat untuk memperhatikan berbagai persoalan anak.

Khusus bagi para kader Posyandu, pendidikan manajemen Posyandu dilakukan dengan memberikan berbagai *training* untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan Posyandu. Sebagai contoh, *training* layanan 5 meja sehingga para kader bisa melakukan layanan Posyandu secara mandiri. Layanan ini mulai dari pendaftaran, pengisian buku Kartu Menuju Sehat (KMS) hingga pemeriksaan ibu hamil dan anak.

Hasilnya, nampak pada kemampuan para ibu yang meningkat dalam melakukan layanan pemeriksaan bagi anak-anak dalam program Posyandu. Dalam kegiatan Posyandu di empat gampong, para kader Posyandu sudah sangat terampil dalam melakukan aktivitas pelayanan di Posyandu. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan ibu dalam Pemberian Makanan Tambahan (PMT) meningkat dengan baik. Pengetahuan mereka untuk mengolah makanan yang berasal dari lingkungan lokal cukup menonjol. Bahkan khusus di Gampong Birek, kesadaran para kader Posyandu terlihat dengan adanya program mandiri dalam bentuk iuran warga masyarakat untuk program PMT setiap bulannya.

Program kesehatan anak-anak, ibu hamil dan melahirkan juga dilakukan oleh PLAN International dengan mengupayakan jaringan koordiansi antara kader Posyandu dengan layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Jaringan yang ada seperti pertemuan dan koordinasi antara kader Posyandu dengan Puskesmas, koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya sektor kesehatan dengan SKPD kesehatan.

Pada program Posyandu dan Polindes, PLAN International juga memberikan bantuan berupa bangunan Posyandu dan Polindes kepada gampong-gampong yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Bangunan Posyandu dan Polindes yang tersebar di setiap gampong ternyata mampu memberikan manfaat yang

cukup besar bagi anak-anak maupun ibu-ibu khususnya. Adanya Posyandu dan Polindes ternyata mampu memberikan ruang bagi ekspresi untuk anak-anak, khususnya untuk arena bermain mereka. Sedangkan bagi ibu-ibu meningkat keterampilan bagi pemberian layanan pada Posyandu cukup memberikan kontribusi pada anak-anak.

PLAN International tidak hanya berhenti di situ saja, akan tetapi juga melengkapi fasilitas Posyandu dan Polindes. Kelengkapan di Posyandu misalnya mulai dari meja, kursi, timbangan anak hingga kelengkapan untuk pemeriksaan anak. Bahkan, taman bermain anak dengan kelengkapan edukasi anak dan alat-alat bermain juga diberikan. Sedangkan untuk Polindes, PLAN International memberikan bantuan kelengkapan pemeriksaan dasar komplit untuk bidan desa yang tinggal di sana, mulai dari obat-obatan hingga kelengkapan kantor. Khusus untuk bidan desa, dalam penempatan di Polindes, PLAN International bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Program pendidikan bagi anak, khususnya untuk mendorong sekolah anak dilakukan dengan banyak skema. Dorongan pendidikan ini khususnya bagi anak usia pra sekolah dasar yang ada di gampong yang minim fasilitasnya. Rintisan untuk mendorong kemampuan para kader dalam mengelola *play group* misalnya, dilakukan sebagai upaya untuk mendorong gampong mempunyai sekolah formal dalam bentuk *play group* maupun Taman Kanak-Kanak.

Mendorong pemenuhan kebutuhan anak bukanlah hal sederhana. PLAN International juga membangun program bagi peningkatan ekonomi rumah tangga untuk mendorong program pemulihan anak bisa dilakukan melalui peningkatan ekonomi rumah tangga yang bisa secara cepat dilakukan. Dukungan program ini berupa pertanian dan peternakan yang sesuai dengan karakter ekonomi masyarakat dampingan PLAN International. Dukungan PLAN International ternyata sedikit banyak memberikan dampak

cukup cepat. Program pertanian dan peternakan banyak membantu pemulihan ekonomi secara cepat dan hal ini sangat membantu pada pemulihan kondisi kehidupan anak-anak di dalam keluarga.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa selama ini program untuk anak di tingkat gampong masih sebatas program-program pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Perhatian pada dua program pelayanan dasar ini disebabkan kecenderungan selama ini di mana layanan pelayanan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan sudah bisa menjangkau sampai di tingkat desa/gampong. Tetapi, masih banyak keterbatasan melingkupi implementasi dua program ini.

Peran dari lembaga-lembaga non pemerintah cukup kuat karena paska tsunami pemerintah disibukkan dengan banyaknya bidang-bidang yang harus ditangani. Bantuan dari pihak luar dalam jangka pendek memang diperlukan, namun tidak boleh berkepanjangan sehingga justru menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu, harus ada upaya transformasi agar program-program tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Strategi transformatif tersebut sekaligus untuk mendorong agar upaya pemenuhan hak anak diletakkan dalam konteks yang lebih luas, tidak sebatas pada pelayanan dasar semata. Bab berikutnya akan mengurai tentang strategi transformatif untuk mendorong gampong peduli hak anak.

Program Intervensi Menuju Gampong Peduli Hak Anak

Upaya mendorong proses baru yang lebih kondusif agar gampong memperhatikan kondisi yang dialami oleh anak-anak merupakan suatu keniscayaan. Paska konflik dan tsunami, anak-anak tetap membutuhkan perlindungan akan rasa aman di dalam lingkungannya. Sudah cukup lama anak-anak kehilangan rasa aman akibat konflik yang berkepanjangan sehingga tidak dapat mengembangkan bakat dan minat belajarnya secara leluasa. Bahkan tak sedikit anak-anak yang menjadi korban konflik dan mengalami trauma akibat tsunami. Padahal, mereka sebenarnya memiliki hak untuk hidup secara layak, hak untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana usia anak-anak pada umumnya yang selalu menghadirkan keceriaan, kegembiraan dalam bermain, kenakalan dan kejenakaan yang menghibur keluarga dan lingkungannya. Kini, sudah saatnya anak-anak meraih apa yang sudah menjadi haknya, dengan cara memperoleh kesempatan berpartisipasi untuk ikut menentukan apa yang terbaik menurut pilihan di dalam membangun dunia yang diimpikannya.

Siapakah yang paling bertanggung jawab mewujudkan

hal itu?. Selain keluarga, tentu juga gampong sebagai unit pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat. Bagaimana proses mengembangkan gampong yang peduli pada hak anak?. Pada bagian ini akan diurai berbagai intervensi dan kegiatan bersama masyarakat. Kegiatan diawali dengan melakukan *assessment*. Proses *assessment*, yakni pengenalan dan sekaligus melakukan pemetaan situasi yang terkait dengan permasalahan utama, potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendorong dan mengembangkan program ini di gampong. Di dalam melakukan kegiatan *assessment*, tim IRE-GP juga melakukan pengenalan, sosialisasi guna menjalin proses adaptasi agar terjalin kondisi-kondisi yang membuat warga masyarakat menerima kehadiran tim sebagai teman, sahabat dan mitra kerja di dalam menjalankan program ke depan nantinya.

Proses beradaptasi di tengah masyarakat dimulai dari melakukan silaturahmi, diskusi, pengamatan bersama dengan para tokoh-tokoh masyarakat atas kondisi lingkungan gampong. Proses beradaptasi dengan para tokoh masyarakat ini begitu mudah terjalin keakraban karena pendekatan yang dilakukan oleh tim tidak bersifat formal dan kaku. Selain itu, tim IRE-GP menggunakan pola pendekatan informal terutama disaat tim melakukan *live in* atau tinggal bersama di rumah para tokoh gampong. Juga para aktivis Plan International yang tergabung di dalam tim *Community Development Fasilitator* (CDF) yang sudah lama bekerja menangani program Plan International yang sebelumnya telah merintis jalan yang memudahkan tim IRE-GP mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Silaturahmi juga dilakukan pada beberapa warga sehingga terjalin pembicaraan yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi oleh warga terkait dengan isu gampong, ibu dan anak. Setelah terjalin komunikasi yang akrab, tim kemudian melakukan diskusi berkelompok

yang melibatkan kaum ibu dan bapak, juga pemuda. Sedangkan untuk diskusi dengan anak dilakukan tersendiri dengan metode yang lebih sesuai dengan kondisi-kondisi usia mereka, seperti dengan menggunakan media menggambar, bercerita, menyanyi agar tim dapat menjadi bagian kehidupan mereka sehingga bisa mengungkapkan tentang kondisi yang dialami di lingkungannya dan impian-impian akan masa depannya.

Dari hasil *assessment*, ditemukan berbagai kondisi-kondisi permasalahan di gampong dan lingkungan masyarakat. Terdapat kondisi-kondisi yang memiliki kesamaan yang dialami keempat lokasi program ini, terutama terkait dengan tata kelola pemerintahan gampong. Namun terdapat pula kondisi-kondisi tertentu yang berbeda dari masing-masing gampong paska peristiwa tsunami. Kesamaan yang dimiliki oleh masing-masing gampong secara umum adalah belum bekerjanya tata pemerintahan yang efektif dan optimal didalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh dua faktor utama. *Pertama*, proses rentang konflik yang begitu panjang. *Kedua*, peristiwa tsunami.

Selama konflik yang berkepanjangan, praktis dinamika pemerintahan gampong tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti tiadanya gerakan mendorong roda pembangunan bersama masyarakat, pengelolaan rencana pendapatan dan berbagai proses untuk mendistribusikannya kembali ke masyarakat melalui pelayanan publik yang dibutuhkan warga. Para perangkat juga tidak pernah membuat perencanaan-perencanaan yang mengarah pada perbaikan kondisi di lingkungan gampong, baik ekonomi, sosial dan budaya. Kalau toh ada pembangunan di gampong, tak lebih proyek instruksi dari unit pemerintahan di atas gampong.

Kepemimpinan yang bekerja di gampong adalah kepemimpinan sosial yang bersifat spontan dan alami.

Misalnya, adanya proses membantu memberikan pertolongan ketika terdapat warga yang sedang menderita sakit cukup parah, juga mendamaikan konflik antarwarga dan sejenisnya. Itu pun bersifat personal, bukan kelembagaan. Dalam proses konflik, hampir sebagian besar warga tidak berantusias atau berminat menjadi keuchik atau perangkat gampong karena selalu berada dalam kondisi tekanan tarik menarik pihak-pihak yang sedang terlibat berkonflik. Tak mudah bagi keuchik atau perangkat gampong berada dalam posisi yang dianggap netral oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik senjata. Kondisi inilah yang membuat gampong cenderung statis. Kalau toh dianggap hidup, namun hanya sebatas simbol papan nama. Apalagi di masa kekuasaan Orde Baru, hampir di berbagai wilayah di Indonesia, partisipasi masyarakat dan kepemimpinan yang didukung oleh masyarakat dipangkas agar tidak dapat tumbuh dan berkembang.

Dalam kasus Aceh, pemerintahan lokal di tingkat gampong yang berbasis pada adat istiadat dan kebudayaan setempat juga tidak dapat tumbuh. Seperti kelembagaan Tuhapeut, Tuhalapan, Imeum Mukim¹ tak dapat hidup karena digantikan struktur birokrasi pemerintahan yang telah diseragamkan oleh kekuasaan orde baru melalui birokrasi desa. Begitu pula dengan peran kecamatan yang condong melaksanakan segala perintah para pejabat yang kedudukannya berada lebih atas. Dalam suasana konflik dan penyeragaman struktur pemerintahan lokal di Indonesia, masyarakat Aceh mengalami keterasingan, baik dengan struktur tata pemerintahan, kinerja pemerintahan

1 Istilah ini muncul kembali paska perjanjian damai Helsinki antara GAM dan Pemerintah RI yang kemudian ditindaklanjuti dalam perundangan otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Ada proses yang senafas antara UU otonomi khusus NAD ini dengan pemerintahan paska orde baru yang telah mengembangkan desentralisasi dan otonomi daerah yang menghargai keragaman lokal.

sampai pada pola hubungan perangkat pemerintahan gampong dengan aktifitas warganya. Puluhan tahun dalam rentang konflik antara warga dengan pemerintahan lokalnya seolah tidak saling menyapa, dan saling berjalan sendiri-sendiri. Bahkan ketika terdapat gampong, yang mengalami identifikasi sebagai bagian dari basis sosial dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maka dinamika partisipasi pembangun praktis tidak berjalan. Sebaliknya, aura ketegangan dan ketercekaman mewarnai dinamika gampong. Sampai kemudian datang gelombang tsunami yang memecah kesunyian itu. Berbagai perubahan politik terjadi manandai babakan baru kehidupan gampong yang lebih berpengharapan.

Setidaknya paska tsunami, hampir semua pihak berfikir dan membangun perencanaan akan pentingnya menghidupkan gampong setelah sekian lama "tidur lelap" agar mampu berperan banyak 'menolong' dan memberdayakan warganya akibat dampak konflik dan tsunami. Berbagai regulasi dilakukan oleh pemerintah NAD untuk membuat gampong bangkit dan bergairah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Begitu pula dengan lembaga-lembaga donor di tingkat internasional, nasional dan lokal bersatu padu menumbuhkan cara pandang dan pendekatan program berkenaan dengan pentingnya peran gampong di tengah masyarakat.

Baik pemerintah dan lembaga donor serempak membangun kantor-kantor gampong yang roboh akibat diterjang tsunami lengkap dengan peralatan perkantoran. Lembaga-lembaga donor dengan pemerintah daerah saling bekerjasama mensponsori dan memfasiliasi terselenggarakannya adanya pemilihan keuchik dan perangkat di tingkat gampong. Juga program-program pelatihan dan fasilitasi agar para perangkat gampong memahami tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah dan para lembaga donor saling bekerjasama dan mengisi

peran untuk saling melengkapi agar tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan di gampong dapat bekerja mendorong pembangunan dan pemberdayaan warganya. Pemerintah daerah membuat regulasi atas gampong agar memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahunan. Pemerintah daerah juga membuat instrumen Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk memastikan dan merangsang semangat warga dan perangkat gampong agar memacu pembangunan dan peningkatan kualitas warganya.

Paska konflik dan tsunami, gampong tumbuh memberikan harapan baru. Meskipun berbagai masalah, kendala dan tantangan yang menghadang juga mengikuti perannya. Paska tsunami kondisi yang dialami oleh gampong memiliki keragaman potret permasalahan sehingga menghidupkan kembali fungsi gampong tak semudah membalik telapak tangan. Misalnya, sebagaimana yang dialami oleh Gampong Gapuy dan Birek di Kecamatan Lhoong. Sumber daya manusia potensial di kedua gampong ini banyak yang menjadi korban tsunami, sehingga sulit mencari pemimpin yang mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan dan perbaikan strategis dalam pengembangan tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Tak banyak dari para orang tua dan pemuda yang tersisa dan selamat dari tsunami. Dari yang sedikit inilah mereka secara perlahan bangkit, dimulai dengan merintis keluarga baru, menata keluarga dan kembali melahirkan generasi baru. Di gampong ini para, pasangan-pasangan muda membentuk keluarga baru untuk meneruskan pertumbuhan dan keberlanjutan generasi gampong. Cukup banyak anak-anak, atau bayi yang lahir setelah tsunami dari pasangan-pasangan baru yang melakukan pernikahan diantara mereka setelah selamat dari gelombang tsunami. Kondisi ini membuat kebutuhan program di gampong berupaya untuk lebih menitik beratkan pada kondisi ibu

hamil, melahirkan, menyusui dan tumbuh kembang bayi menjadi fokus perhatian utama. Selain anak-anak usia remaja yang selamat dari gelombang tsunami. Tak mudah menata keluarga, sekaligus menata gampong. Adanya berbagai bentuk program pemberdayaan juga membutuhkan proses waktu untuk mencapai tahapan keberhasilan.

Plan International yang memiliki perhatian utama terhadap isu anak, di empat gampong pelaksanaan program ini sudah melakukan berbagai intervensi program dengan melatih warga untuk menjadi kader Posyandu. Juga membangun gedung Posyandu dan sarana bermain anak. Para kader-kader Posyandu memperoleh pelatihan agar para ibu selalu memperhatikan kondisi bayi atau anak-anaknya untuk memelihara, merawat dan menjaga kesehatannya. Paska tsunami kegiatan Posyandu yang digerakkan oleh para kader ini berjalan cukup baik. Meskipun ada kekawatiran, paska pendampingan dari Plan International, keberlanjutan dari program kegiatan Posyandu ini akan mengalami penurunan. Untuk itulah muncul pemikiran agar program dan kinerja Posyandu dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan di tingkat gampong.

Dengan pendekatan ini agar juga ada perubahan di kalangan para bapak yang umumnya mendominasi struktur pemerintahan gampong untuk memiliki perhatian terhadap permasalahan kesehatan ibu dan anak yang selama ini selalu dikerjakan hanya oleh komunitas ibu-ibu. Selama ini, urusan anak dipandang semata seolah menjadi urusan ibu, bukan bapak. Dalam kasus Gampong Birek dan Gapuy, kondisi keterbatasan sumber daya manusia menuntut adanya kesatupaduan program antara pemerintah gampong dan para kader Posyandu agar segala yang terkait dengan tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik.

Misalnya, pengalaman para kader di Gampong Gapuy dan Birek saat harus mengalami proses persalinan dan

kesibukan merawat balita, kegiatan Posyandu sempat pula terganggu karena ketiadaan para kader yang menggerakkan kegiatan Posyandu. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian dari pemerintahan gampong. Tanpa ada perhatian dari pemerintahan gampong, memungkinkan kinerja Posyandu mengalami kemacetan di kemudian hari. Apalagi kedua gampong ini belum memiliki RPJMG dan RKPG sehingga belum memiliki orientasi perencanaan program dan alokasi pendanaan pembangunan yang akan dijalankan di gampong.

Berbeda dengan kondisi Gampong Aneuk Paya dan Lamgirek di Kecamatan Lhoknga yang tidak terkena langsung dampak tsunami sehingga sumber daya manusia di gampong ini tidak banyak kehilangan, masih banyak yang selamat dari terjangan tsunami. Kondisi ini lebih membuat kinerja tata pemerintahan gampong cepat bekerja. Proses partisipasi masyarakat dengan perangkat gampong sudah mulai berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kedua gampong ini memiliki RPJMG dan RKP gampong, meskipun di dalam RPJMG dan RKP belum memuat perencanaan dan penganggaran untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anak. Fasilitas-fasilitas yang memberikan kemudahan bagi tumbuh kembang anak juga belum memadai. Semuanya masih berjalan secara alami. Di kedua gampong ini, Plan International sudah membangun gedung Posyandu. Juga sudah membentuk kader-kader Posyandu yang telah bekerja mengembangkan kesehatan ibu dan anak secara baik. Namun antara program dan kinerja Posyandu dengan gampong masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga ketika ada problem yang dihadapi oleh kader-kader Posyandu, perangkat gampong tak juga turut membantu memecahkan.

Dari hasil *assessment* juga terlihat, bahwasannya dalam soal mengelola urusan anak, keempat gampong memiliki perbedaan situasi dan kondisi. Untuk Gampong Lamgirek

dan Aneuk Paya Kecamatan Lhoknga, sekalipun letak geografis juga tidak terlalu berjauhan dengan jarak pantai, namun perbukitan yang mengelilinginya membuat gampong ini lebih dekat dengan kultur masyarakat agraris. Lebih banyak penduduk yang bertani dan bercocok tanam di sawah. Kedua gampong ini tidak mengalami dampak tsunami secara langsung. Sehingga dapat dengan mudah melakukan respon dan tanggap bencana serta membangun hubungan dengan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana.

Berbeda dengan Gampong Birek dan Gapuy Kecamatan Lhoong yang mengalami dampak tsunami langsung karena posisinya berada di bibir pantai, atau dapat disebut sebagai gampong pesisir pantai. Hampir semua bangunan dan infrastruktur publik rusak dihantam tsunami, belum lagi rumah-rumah penduduk yang hancur dan korban warga yang berjatuh. Sudah 4 tahun program rekonstruksi dan rehabilitasi korban tsunami, fasilitas listrik di gampong ini hanya dapat hidup di malam hari sampai jam 6 pagi. Jika ada kepentingan dan kegiatan warga di luar jam itu, maka harus mengandalkan mesin genset dengan menyewa. Khusus untuk Gapuy, hingga kini jalan menuju gampong ini belum juga diaspal sehingga mengesankan gampong ini masih terisolasi dengan gampong-gampong lainnya di Aceh Besar.

Jadi, dengan melihat kondisi-kondisi gampong-gampong tersebut maka kebutuhan untuk memberdayakan gampong ramah anak menjadi sangat relevan. Dalam arti bagaimana membuat kebijakan dan tata kelola gampong yang memiliki kepekaan atas kondisi yang dialami oleh anak. Terbangun kebijakan, sistem dan tata kelola gampong yang terkait dengan pemenuhan atas hak-hak anak-anak. Gampong harus memperhatikan kondisi-kondisi anak, sebab anak cenderung mengalami kerentanan dan gangguan-gangguan psikis, kesehatan dan lainnya yang

memungkinkan ia tidak dapat tumbuh kembang secara baik. Padahal, sudah menjadi pandangan umum bahwa hanya anak yang memperoleh perhatian yang memadai dari keluarga dan masyarakat nantinya akan tumbuh generasi penerus yang berkualitas sehingga dapat menjadi tumpuan harapan keluarga, masyarakat dan bangsa.

Mengorganisir Aktor

Di tengah upaya melakukan *assesment* juga dilakukan proses untuk membangun jalinan persahabatan terhadap warga sebagai upaya untuk saling menumbuhkan kepercayaan. Proses-proses dialogis, saling membangun empati dilakukan agar terjadi integrasi atau kesatuan pemahaman dan juga komitmen atas berbagai rencana program ini nantinya ke depan. Respon masyarakat atas rencana program ini yang sangat positif, hal ini memberi keyakinan akan adanya perubahan kebiasaan baru nantinya, baik dari sisi cara pandang aktor dan kebijakan gampong. Program gampong peduli hak anak atau ramah anak memang terdengar indah dan membuat hampir semua orang bersimpati dan bergembira. Menuju proses mencapai pemahaman dan tindakan ke arah itu tak mudah diwujudkan. Sebagaimana yang ditunjukkan hasil *assessment*, yakni bahwa tidak mudah menghadirkan peran kepemimpinan dan tata pemerintahan gampong bekerja secara maksimal setelah sekian lama redup dan tak pernah hadir di tengah masyarakat. Begitu pula dengan soal anak, yang secara umum dipandang sebagai wilayah pemberdayaan yang dilakukan di tingkat keluarga. Selain keterbatasan sumber daya manusia, gampong juga menghadapi masalah kompleksitas kebijakan pemerintah yang tak mudah tersosialisasi dan dilaksanakan di gampong.

Memang di tengah keterbatasan itu, ada semangat yang menjadi kekuatan di kalangan warga gampong untuk mengatasi permasalahan dan membangun kehidupan

baru yang lebih baik untuk masa depan anak-anak mereka nantinya. Pengaruh agama begitu kuat melekat dalam diri orang tua di Aceh, bahwa anak itu amanah dan anugerah Tuhan yang harus dijaga, dipelihara, dirawat dan didik agar dapat tumbuh kembang sehingga menjadi manusia yang bermanfaat untuk alam dan sesamanya. Begitu pula tradisi yang berkembang di masyarakat, anak adalah tumpuan harapan keluarga sehingga orang tua akan memiliki kekuatan kerelaan berkorban untuk perkembangan masa depannya. Keyakinan dan modal sosial inilah yang menjadi kekuatan pengারণan atas implementasi program ini dalam mengatasi berbagai problem yang melingkupinya.

Bersama dengan tokoh-tokoh gampong, tim IRE-GP melakukan proses identifikasi berbagai elemen masyarakat, baik dari kaum ibu-ibu, pemuda, tokoh agama, kalangan perangkat gampong seperti keuchik, dan Tuhapeut yang dapat menjadi kader dalam menjalankan program ini. Proses pengorganisasian berbasis aktor di tingkat gampong dilakukan dengan cara membentuk kelompok kerja (*task force team*). Pembentukan tim *task force* dilakukan secara terbuka, disertai semangat penuh kebersamaan yang melibatkan berbagai unsur di dalam masyarakat. Di masing-masing gampong yang menjadi lokasi program ini kemudian dibentuk tim *task force*.

Penguatan kapasitas, yakni pemahaman dan keterampilan dalam menggerakkan program ini dilakukan sebagai bagian dari proses pengorganisasian aktor agar terjadi transformasi (perubahan) kesadaran ke dalam tindakan-aksi pemberdayaan. Kegiatan workshop dilakukan untuk mengkonsentrasikan para aktor agar mencapai pemahaman dan kesadaran baru berkenaan dengan kepekaan cara pandang atas anak (*children mainstreaming*) dan tata kelola pemerintahan gampong yang peduli atas kebutuhan dasar anak. Diantara materi yang disajikan untuk

memperdalam pemahaman dan menumbuhkan komitmen adalah 1) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik 2) hasil kovenan PBB tentang hak-hak anak dan regulasi di tingkat nasional dan daerah yang berkenaan dengan perlindungan dan hak tumbuh kembang anak 3) mensinergikan isu anak dalam kebijakan gampong, 4) mekanisme dan teknik merumuskan RPJMG dan RKPG, ADG dan Qanun Gampong.²

Berbagai materi *workshop* disajikan melalui proses partisipatif yang menempatkan peserta dengan para penyaji atau fasilitator sebagaimana pendidikan orang dewasa. Peserta sebagai subyek yang juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kemudian diperdalam melalui proses-proses interaksi dengan pengetahuan fasilitator dan penyaji materi *workshop*. Di dalam *workshop* ini, selain diupayakan untuk memperdalam pemahaman juga mengembangkan keterampilan di dalam merumuskan regulasi atau qonun di tingkat gampong. Oleh karena itu, proses penugasan dan simulasi peran untuk mempertajam keterampilan peserta, seperti di dalam membuat RPJMG dan qanun gampong ramah anak, dilakukan di dalam *workshop*.

Hampir dalam setiap sesi respon peserta cukup antusias. Pengetahuan baru yang mereka dapatkan, terutama yang terkait dengan hak-hak anak dan tata kelola gampong agar juga diorientasikan memikul tanggung jawab atas isu anak menarik perhatian mereka. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Jumiati dari Gampong Aneuk Paya:

"Dalam kegiatan Posyandu, hampir semua urusan dilakukan oleh kader Posyandu. Padahal, kalau pemerintah gampong juga tahu masalah yang kami hadapi, pasti jalan keluarnya lebih baik"

2 Berbagai materi di dalam *workshop* juga tersajikan dalam bentuk modul sebagai bahan bacaan peserta agar lebih mudah memahami dan menerapkan materi sesuai tujuan kegiatan.

Kegiatan Posyandu sebagai pusat kegiatan kesehatan ibu dan anak disadari akan jauh lebih berdaya ketika saling berpadu dengan kebijakan dan program gampong. Hampir semua warga sebenarnya menyadari betapa kegiatan Posyandu itu memiliki peranan penting dalam menjaga dan merawat kesehatan ibu dan anak. Di Posyandu, ada kegiatan pemeriksaan ibu hamil, imunisasi anak, pemberian makanan tambahan (PMT) agar anak tidak mengalami gizi buruk sehingga tumbuh kembangnya tidak terganggu. Dapat dibayangkan, betapa runyam kondisi kesehatan ibu dan anak, jika urusan yang teramat penting ini hanya sekedar bertumpu pada kader Posyandu semata tanpa ditopang dengan keberpihakan kebijakan pemerintahan gampong. Tak sedikit ibu-ibu yang mulai mengeluh karena anggaran Posyandu serba terbatas dan hanya menggantungkan pada alokasi anggaran PKK dan juga lembaga donor yang sifatnya jangka pendek yang tidak berkelanjutan.



Para kader Posyandu mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan bersama dalam acara rutin pertemuan forum kader Kecamatan Lhoong

Dari interaksi pengetahuan dalam *workshop* ini muncul kesadaran dan komitmen, betapa pentingnya isu anak masuk ke dalam sistem dan mekanisme kebijakan pemerintahan gampong. Isu anak harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat gampong. Pemerintah gampong yang memiliki kekuatan membuat kebijakan, pengalokasian anggaran diharapkan mengambil peranan penting untuk peduli pada pemberdayaan anak. Para peserta *workshop* semakin menyadarinya betapa adanya kebijakan-kebijakan gampong yang senantiasa peduli pada kebutuhan hak dasar anak akan menciptakan suasana baru yang lebih berkualitas di dalam mendorong tumbuh kembang anak. Isu anak juga menjadi bagian dari isu strategis sebagaimana program-program pembangunan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian.

Di dalam benak peserta muncul impian tentang gampong peduli hak anak adalah gampong yang di dalamnya tidak ada anak yang mengalami gizi buruk, pencegahan mengurangi kematian ibu atau anak dalam proses persalinan, tidak adanya anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga. Juga anak-anak yang tidak memiliki sarana, dan akses bermain dan belajar untuk mengasah minat dan bakatnya di lingkungan gampong. Impian ini juga dirangsang oleh pemaparan hasil *children consultation* atau *focus group discussion* di 4 gampong antara tim IRE-GP bersama anak-anak dengan metode bercerita, menggambar dan menyanyi. Dari suara anak-anak, muncul harapan dan keinginan agar mereka memiliki tempat bermain dan belajar yang nyaman sehingga menjadi anak yang pintar.

Dari proses *workshop* ini, Keuchik Gampong Lamgirek berkomitmen untuk melakukan perubahan atas rumusan RPJMG yang telah tersusun sebelum kegiatan *workshop* pada upaya perumusan baru yang nantinya akan memasukkan tentang pemenuhan kebutuhan dasar anak. Sedangkan gampong lainnya, seperti Gapuy dan Birek

yang memang belum menyusun RPJMG, akan melakukan upaya penyusunan dengan memperhatikan kebutuhan hak dasar anak, terutama mengaitkan kegiatan Posyandu kedalam program gampong. Ada pula upaya di dalam proses penyusunan kebijakan gampong, anak-anak akan dilibatkan dalam forum-forum perencanaan pembangunan gampong. Pelibatan anak atau partisipasi anak dengan cara minimal menghadirkan mereka dalam rapat atau musyawarah gampong. Komitmen ini disambut positif oleh peserta yang lain, tim IRE-GP dan juga Plan International. Terkait dengan adanya partisipasi atau keterlibatan anak dalam musyawarah gampong, salah seorang staf Plan International, Junaidi Saripurnawan mengungkapkan gagasan sebagai berikut:

"bisa jadi ketika anak-anak dihadirkan di dalam forum-forum di gampong, mereka hanya menangis, tapi itu dapat ditangkap sebagai bahasa aspirasi anak, sebab bahasa aspirasi anak tak dapat disamakan dengan bahasa orang dewasa dalam menyampaikan aspirasi".

Ungkapan ini tentu sangat menarik. Kehadiran anak dalam sebuah rapat setidaknya dapat mengingatkan, merangsang dan menginspirasi para orang tua yang sedang merumuskan kebijakan bagaimana memperhatikan tumbuh kembang kehidupan anak-anak secara baik dan layak. Kehadiran anak dalam rapat atau forum perencanaan pembangunan di gampong juga dapat menginspirasi bahwa anak juga bagian dari warga atau komunitas di gampong. Di tangan merekalah kelak pembangunan gampong diteruskan. Adanya pemahaman bahwa kehadiran anak dapat menjadi gangguan bagi para bapak atau ibu dalam merumuskan kebijakan melalui forum-forum rapat di gampong, ditegaskan oleh peserta *workshop* bahwasan-

nya tidak selamanya hal itu benar.

Usai dilakukan *workshop* terhadap para tim *task force* di empat lokasi gampong utama sasaran program, dan juga beberapa gampong tetangga, seperti Gampong Nusa, juga para kader Plan International yang tergabung di dalam CDF, dilakukan pula *workshop* lanjutan dengan peserta yang lebih luas dengan melibatkan para ibu-ibu, bapak dan pemuda serta perangkat gampong di lokasi program. Fasilitator dan pematernya adalah para tim *task force* yang sudah mengikuti *workshop* sebelumnya.



Kader Posyandu belajar membuat qanun tentang perlindungan anak

Dengan menjadikan tim *task force* sebagai fasilitator dan pematernya di dalam *workshop* lanjutan, tujuan utamanya adalah selain melatih agar mereka dapat percaya diri, juga bagian dari proses transformasi pengetahuan dan

tanggung jawab dikemudian hari bahwa tim *task force* inilah kelak yang diharapkan paling bertanggung jawab untuk terus menjaga keberlanjutan program ini, bahkan mengembangkan kesadaran dan tindakan warga yang lebih luas lagi untuk memperhatikan hak-hak anak agar dapat tumbuh kembang secara baik. Dari serangkaian *workshop* yang dilaksanakan, tak kurang sebanyak 63 kader yang telah mendapatkan pengembangan kapasitas akan pentingnya menempatkan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat gampong. Para kader ini juga telah membentuk organisasi komunitas guna terus mendorong gampong agar ramah untuk tumbuh kembang anak.

Membangun Lintas Jaringan

Disadari dari awal bahwa menumbuhkan kesadaran dan memperkuat isu gampong yang peduli pada hak-hak anak tak dapat dilakukan hanya sekedar memperkuat kapasitas aktor internal di tingkat gampong semata. Hal ini disebabkan dinamika kebijakan utamanya di tingkat kabupaten juga sangat mempengaruhi kondisi-kondisi yang terjadi di gampong. Dalam hal itulah proses membangun jaringan antaraktor atau komunitas lintas gampong menjadi sesuatu yang penting dilakukan. Proses berjaringan, menumbuhkan kerjasama dan kebersamaan, terutama antar tim *task force* di setiap gampong. Tim IRE-GP memfasilitasi dan mensupervisi pertemuan-pertemuan tim *task force* antargampong ini, selain sebagai sarana proses *sharing* dan saling belajar antargampong juga mendiskusikan problem yang muncul di lapangan, capaian yang telah diperoleh juga membangun perencanaan strategis untuk mengembangkan langkah lanjutan.

Dari berbagai pertemuan itulah dikembangkan pula proses untuk membangun jaringan dengan aktor-aktor di tingkat kecamatan dan kabupaten, baik di legislatif dan

juga eksekutif. Mempengaruhi kebijakan dan regulasi di tingkat kabupaten sangat bermanfaat untuk memperkuat dan memperluas pemahaman dan tindakan menuju gampong ramah anak. Beberapa kali dilakukan pertemuan dengan Komisi E di DPRK Aceh Besar dan juga pertemuan dengan Ibu Laila Buchori, istri Bupati Aceh Besar. Saat menjadi pembicara seminar "Gampong Berperspektif Anak" yang diadakan oleh IRE-GP, Ibu Laila Buchori mengatakan pentingnya untuk mendorong agar kebijakan kabupaten semakin memberdayakan anak, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan, seperti program pembuatan akte kelahiran secara gratis juga partisipasi anak dalam pembangunan di gampong.³

Dari hasil dialog kabupaten antara tim *task force* dengan Komisi E DPRK Aceh Besar mendapatkan respon yang sangat positif. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ketua Komisi E, Bapak Iwan Sulaiman:

"Dengan adanya kelompok kerja di gampong yang peduli terhadap persoalan anak diharapkan nantinya alokasi dana di gampong dapat dialokasikan pula untuk kebutuhan dasar anak, selain alokasi untuk perbaikan infrastruktur, gaji perangkat dan program pemberdayaan lainnya".

3 Program Plan International yang bekerjasama dengan pemerintah Aceh Besar telah berhasil merumuskan kebijakan pembuatan akte gratis untuk anak-anak pasca tsunami sebagai bagian dari hak perlindungan anak agar memiliki identitas dan status yang jelas di dalam keluarga dan masyarakatnya. Tetapi, di lapangan cukup banyak pula kendala atas program ini. Seperti adanya berbagai keluhan warga, sekalipun pembuatan akte kelahiran gratis, namun biaya mengurusnya dari gampong ke kabupaten yang sangat jauh membutuhkan biaya transportasi yang relatif mahal untuk ukuran warga gampong. Ada usulan agar ada desentralisasi kewenangan agar akte kelahiran dapat diurus cukup di tingkat kecamatan.

Ungkapan di atas sebagai penegasan betapa gema gampong peduli hak anak mulai muncul di dalam gampong sendiri dan sudah pula mendapatkan apresiasi dari kabupaten. DPRK juga akan melakukan proses regulasi yang lebih memperhatikan hak-hak anak dalam pembahasan tahun anggaran baru. Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh Ibu Bupati saat menjadi narasumber seminar tentang gampong ramah anak dan juga kehadirannya pada saat memberi sambutan dengan membawa Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar pada penyelenggaraan festival anak di Gampong Lamgirek.⁴

Tim *task force* melakukan dua model didalam membangun jaringan, yakni horisontal dan vertikal. Jaringan yang bersifat horisontal adalah memperluas media-media pembelajaran di kalangan warga agar memahami berbagai pengetahuan yang terkait dengan kebutuhan dasar anak, beserta peran yang perlu dilakukan oleh keluarga dan kelembagaan pemerintahan gampong. Berbagai kegiatan di gampong, dilakukan dengan manajemen yang membuka seluas mungkin partisipasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Semisal, adanya *workshop* menuju gampong ramah anak dan juga kegiatan festival anak yang dilakukan di hampir setiap gampong.

Kegiatan festival anak memberikan antusiasme luar biasa, baik di kalangan kaum ibu, bapak, terutama bagi anak-anak sendiri. Berbagai aneka perlombaan digelar dalam festival ini, diantaranya yakni lomba mengarang untuk anak tingkat SLTA dan SLTP, untuk balita lomba menggambar, mewarnai, lomba bayi sehat dan untuk kaum ibu lomba memasak pemberian makanan tambahan (PMT) untuk bayi. Selama konflik dan tsunami, baru kali ini terjadi event atau kegiatan yang begitu ramai melibatkan anak-anak di gampong. Suasana begitu ceria, gembira dan

4 Lihat *Proceeding Seminar*, "Membangun Gampong Berperspektif Anak", diadakan oleh Tim IRE-GP di Hotel Nanggroe pada tanggal 20-21 Agustus 2008.

penyuh akrab tampak dari wajah dan gerak tubuh ibu-ibu dan juga anak-anak.



Lomba menggambar pada kegiatan festival anak

Kegiatan seperti festival anak menjadi media pembelajaran, betapa kegiatan-kegiatan semacam ini memberi tekanan agar di masa mendatang pemerintah gampong dan juga warga sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menyediakan ruang belajar dan bermain di kalangan anak-anak agar minat dan bakat mereka dapat berkembang, dan juga keceriaan dan kegembiraan anak dapat tumbuh di gampong. Sebagaimana hasil yang ditulis oleh para anak-anak yang mengikuti lomba mengarang dan menggambar. Mereka semuanya ingin menjadi anak yang pintar, cerdas dan dapat membahagiakan orang tua dan lingkungan masyarakatnya. Kondisi anak yang sehat dan

ceria melalui fasilitasi kegiatan dapat mengurangi tekanan kesedihan akibat trauma konflik dan tsunami, terutama anak-anak yatim dan piatu atau yang ditinggal oleh kematian kerabat dan teman-teman bermainnya.

Sedangkan untuk memperluas jaringan yang bersifat horisontal adalah dengan membangun komunikasi dan hubungan-hubungan sosial lainnya dengan para aktor yang memiliki pengaruh di tingkat legislatif dan eksekutif. Untuk mempererat komunikasi dan hubungan ini diantaranya adalah dengan mengundang kehadiran mereka pada kegiatan seperti festival anak, juga dialog kabupaten, yakni melakukan *hearing* dengan para anggota dewan agar tim *task force* memahami hal-hal penting dan strategis berkaitan dengan agenda dewan yang terkait dengan regulasi. Dari proses diskusi itu, para anggota dewan juga mengetahui dan dapat membangun komitmen terhadap dinamika dan aspirasi dari warga gampong yang mulai bergerak melakukan pemberdayaan atas hak-hak dasar anak.

Bagi tim *task force*, kegiatan semacam ini juga sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebelum kegiatan, ada perasaan tidak percaya diri karena belum pernah mengalami. Untuk mengatasi perasaan itu, tim *task force* melakukan beberapa kali pertemuan untuk mempersiapkan, bahan yang akan dibahas, melatih berbicara atas apa yang akan didialogkan nantinya. Proses persiapan yang dilakukan secara berulang kali membuat mereka mulai muncul rasa percaya diri. Saat dialog dengan dewan berlangsung, sekalipun ada perasaan grogi, namun mereka mampu mengatasinya. Seusai dialog, ada perasaan terkesan dan haru karena mereka mampu melakukan proses penyampaian aspirasi dan berdiskusi dengan penuh akrab.



Tim *task force* berdialog dengan anggota dewan

Pengalaman membangun jaringan dengan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten menambah pengalaman dan meneguhkan kapasitas rasa percaya diri tim *task force* di dalam membangun hubungan sosial, terutama terkait dengan isu-isu perencanaan pembangunan di dalam pemerintahan. Adanya proses komunikasi antara tim *task force* dengan pemangku kebijakan membuat informasi program kabupaten lebih mudah untuk diakses. Proses selanjutnya jika semakin dinamis inisiatif dari tingkat gampong membangun komunikasi maka semakin kuat pula akses pembangunan dari kabupaten yang mengalir ke gampong.

Tim *task force* yang mulai tumbuh kapasitasnya dalam menggulirkan pengetahuan dan komitmen mengembangkan hak-hak anak dalam gampong benar-benar menjadi

tumpuan dan harapan atas keberlanjutan program ini pasca pendampingan Plan International, IRE dan GP. Begitupula dengan proses berjejaringan yang terbentuk antartim *task force* di masing-masing gampong. Sejak melakukan berbagai upaya advokasi dan membangun akses dengan pemangku kebijakan di tingkat kabupaten, komunikasi dan mekanisme pembelajaran bersama di masing-masing gampong dalam mendinamisasi isu anak berlangsung dengan suasana penuh akrab. Ini suasana baru yang mereka dapatkan, setelah sebelumnya hampir tidak ada kontak dan komunikasi antargampong di empat lokasi program ini. Dengan adanya semangat berjejaringan antartim *task force* ini tidak berfungsi sebagai ajang silaturahmi semata, namun juga media pembelajaran bersama dan dapat berfungsi pula memperkuat isu anak dari gampong atas kebijakan kabupaten nantinya.

Proses membangun pengetahuan, kesadaran dan komitmen sudah terbentuk. Proses membangun tindakan juga menghasilkan beberapa capaian berharga. Meskipun tantangan berat terus menghadang. Terutama agar peran dan fungsi tim *task force* sebagai motor penggerak komunitas, baik di tingkat masyarakat dan perangkat gampong. Begitu pula dengan agenda pengawalan agar isu anak secara konsisten ditempatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Suara anak didengar, dan gampong senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak sehingga dapat mencegah berbagai kemungkinan adanya diskriminasi dalam pemenuhan dan pemberian perlindungan atas hak anak.

Beberapa tantangan internal dan eksternal yang nantinya harus mampu diatasi agar tim *task force* dalam upayanya sebagai ujung tombang dan penjaga 'gawang' isu anak dan kaum perempuan di gampong berkelanjutan. Dalam konteks internal, para anggota yang tergabung di dalamnya harus terus berupaya untuk merawat forum-

forum pertemuan tim di tengah berbagai kesibukan harian lain yang dijalannya. Terus berupaya memperluas dan memperbanyak kader agar naik turun 'volume' keaktifan anggota tidak menciptakan kemandegan dalam melakukan kegiatan. Sedangkan tantangan eksternalnya adalah perubahan-perubahan kebijakan dari tingkat gampong, kecamatan dan kabupaten harus terus diadaptasi agar isu anak tidak terpinggirkan oleh berbagai kebijakan baru yang masuk ke gampong.

Peta tentang berbagai bentuk aktivitas untuk mendorong gampong agar peduli hak anak telah dikupas pada bab ini. Di dalamnya telah disajikan beberapa bentuk keberhasilan dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi. Lantas, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari rangkaian kegiatan tersebut. Bab berikutnya akan berisi pelajaran berharga (*lesson learned*) yang bisa dipetik sebagai hasil refleksi atas implementasi program.

Pelajaran Berharga (*Lesson Learned*)

Selama lima bulan membangun proses kebersamaan dan menggerakkan kegiatan gampong peduli hak anak dengan warga dan komunitas di gampong Kabupaten Aceh Besar, khususnya di empat lokasi, yakni Gampong Lamgirek, Aneuk Payau Kecamatan Lhoknga dan Gampong Gapuy, Birek Kemamatan Lhoong, cukup banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik. Pelajaran berharga itu baik untuk internal tim IRE dan GP serta proses ‘jatuh bangun’ bersama warga dan komunitas menggerakkan program. Pada bagian ini akan diurai pelajaran berharga tersebut.

Sejak mulai melakukan proses *assessment* di lokasi program, tim IRE-GP mengamati betapa kondisi-kondisi yang dialami oleh keluarga-keluarga di gampong memperlihatkan bahwasannya situasi baru paska tsunami masih membutuhkan berbagai proses penyesuaian di dalam membangun tata kehidupan lingkungan yang akan dikembangkan. Tak mudah menata kondisi-kondisi lingkungan yang porak poranda setelah diterjang gelombang tsunami. Seperti dalam soal urusan menata keluarga-keluarga yang baru sampai pada kebutuhan mengembangkan peran kelembagaan sosial dan pemerintahan gampong.

Di tengah proses menata kembali kehidupan baru itu, ternyata masih tumbuh harapan dan optimisme untuk bangkit. Ada semangat yang luar biasa menggelora di dalam membangun kehidupan baru. Di wajah-wajah mereka terbersit keyakinan bahwa kehidupan harus terus berjalan, meskipun rasa duka dan derita masih tak sempurna menghilang dalam relung kalbu mereka. Sikap optimis ini ditandai oleh keaktifan warga di dalam melakukan kegiatan bersama di dalam program ini. Bagi tim IRE-GP, hal ini tentu menjadi modal utama di dalam menggerakkan program.

Di dalam pelaksanaan program ini dua isu 'dipadukan (diintegrasikan) ke dalam kesatuan cara pandang dan tindakan di dalam kelembagaan gampong, yakni anak dan tata pemerintahan gampong. Tentu tidak mudah dilakukan, dibutuhkan tahapan proses membangun pemahaman baru terlebih dahulu. Hal ini disebabkan selama ini isu anak cenderung berjalan sendiri tanpa bersentuhan dengan proses perencanaan dan kebijakan gampong. Misalnya, program pembinaan kader-kader kesehatan di gampong yang berfungsi menjalankan program kesehatan ibu hamil, imunisasi untuk balita dan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita agar kualitas gizi anak terjamin dan anak-anak dapat tumbuh kembang secara sehat berjalan sendiri tanpa bersentuhan dengan program dan kebijakan gampong. Padahal, permasalahan anak juga menjadi bagian dari tanggung jawab tata kelola pemerintahan di dalam gampong.

Ada kesan yang muncul sebelum program gampong peduli anak ini bergulir, urusan kesehatan anak pada sejumlah kegiatan Posyandu sebagai urusan ibuisme, artinya sepenuhnya menjadi peran dan tanggung jawab kaum ibu, para bapak seolah lepas tangan. Karena perangkat gampong mayoritas kaum bapak, keputusan penting gampong berada di tangan kaum bapak maka tidak berlebihan

kiranya bila kepekaan kaum bapak tidak terasah di dalam urusan kegiatan Posyandu sehingga gampong belum kuat mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan Posyandu.

Di dalam berbagai kegiatan seminar dan *workshop* pemahaman semacam ini dibedah dan didalami kembali. Betapa pemahaman lama tidak cukup mampu dipertahankan, terlebih dalam kondisi paska tsunami, berbagai keterbatasan dan kompleksitas masalah mendera kaum ibu dan anak-anak sehingga dalam urusan anak tak cukup hanya diserahkan semata pada kaum ibu dan juga institusi keluarga. Sebagai contoh, jika ada anak mengalami gizi buruk atau kematian ibu hamil berulang kali terjadi, tentu kesedihan itu selain menjadi milik para keluarga juga menjadi milik gampong. Kebersamaan inilah yang berupaya tengah dibangun untuk mengatasi permasalahan dan keterbatasan yang ada. Kebersamaan akan menjadi kekuatan ketika institusi gampong mengambil peran dan fungsi di tengah masyarakat.

Proses diskusi semacam ini mengalir dikalangan kaum bapak dan ibu sehingga secara perlahan muncul pemahaman dan kesadaran baru, betapa kaum bapak, terlebih kelembagaan di dalam gampong juga perlu mengambil tanggung jawab untuk mengintegrasikan atau membangun saling keterkaitan berbagai program pembangunan dengan kebutuhan dasar anak. Seperti perlunya menjaga keberlanjutan program kegiatan ibu-ibu atau para kader posyandu di dalam memelihara kesehatan ibu dan anak. Munculnya pemahaman baru ini bahkan berimplikasi pada adanya upaya untuk melakukan perumusan ulang RPJMG dan RKPG agar memasukkan perhatian pada hak-hak anak, seperti Gampong Lamgirek dan Aneuk Payau. Sedangkan untuk Biriek dan Gapuy yang memang belum diadakan musyawarah warga untuk merumuskan RPJMG dan RKPG, akan berupaya memasukkan hak-hak anak nanti di dalamnya.

Proses membangun pemahaman dan komitmen untuk peduli pada anak cukup mudah terbangun karena hampir semua keluarga di gampong memiliki pemahaman yang baik tentang anak dan tumbuh kembang mereka nantinya. Misalnya, anak dipandang secara teologis-keagamaan sebagai titipan sang pencipta, sebab itu anak bagian dari amanah yang harus dirawat dan dijaga agar dapat berkembang secara baik. Kesehatan anak harus terawat, pendidikan anak harus diperhatikan dan rasa kasih dan sayang orang tua, juga kerabat harus ditumbuhkan di dalam keluarga dan masyarakat. Begitu pula cara memandang anak laki-laki dan perempuan, hampir tidak ditemukan cara pandang yang mendiskriminasikan mereka. Baik anak perempuan dan anak laki-laki, terutama dalam urusan pendidikan sama-sama memperoleh kesempatan bersekolah. Sebagaimana yang juga muncul dari pernyataan sepasang keluarga, Ibu Syabariah dan Bapak Ridwan di dalam mendidik keempat putra-putrinya.

Anak itu amanah Allah Swt. Kita perlu membimbing anak kita agar menjadi orang yang taqwa. Karena itu kami ingin mewarisi anak-anak memiliki ilmu pengetahuan dan mendidik akhlak mereka secara Islami agar mereka menjadi anak sholeh dan sholehah agar juga memberikan manfaat bagi orang tua dan masyarakat

Cara memandang anak secara teologis-keagamaan semacam ini menggerakkan dengan cepat paska tsunami meunasah-meunasah berdiri kembali sebagai tempat ibadah dan belajar menimba ilmu-ilmu agama di kalangan anak-anak di gampong. Hubungan antara anak-anak dengan meunasah terasa dekat, karena selain sebagai tempat belajar, juga sarana membangun hubungan-hubungan sosial yang akrab antar sesama anak. Bahkan di tengah

keterbatasan ruang dan fasilitas bermain, di meunasah selain menjadi tempat belajar dan ibadah tak jarang juga dijadikan sebagai tempat bermain anak-anak. Bahkan Po-syandu yang didirikan oleh Plan International dijadikan sebagai sarana bermain anak-anak dan remaja pula.

Memang pada dasarnya anak mempunyai energi yang luar biasa untuk bersosialisasi, berekspresi dan berkreasi. Tempat bermain merupakan salah satu ruang ekspresi bagi anak-anak untuk tumbuh, mengembangkan kecerdasan dan kepribadiannya. Melalui tempat bermain anak-anak dapat melakukan berbagai aktivitas yang disenangi, bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Disamping itu, anak dapat pula mengenal lingkungan sosialnya, sehingga pada akhirnya dapat membentuk jiwa dan karakter anak dikemudian hari. Kehilangan tempat untuk bermain bukan sekedar perkara anak-anak tidak bisa bermain, akan tetapi menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan pembentukan sifat dan sikap anak pada lingkungannya.



Lomba mewarnai oleh anak-anak di Birek

Di dalam FGD dengan anak-anak, dan juga dari hasil lomba karya tulis pada kegiatan festival anak, tim IRE-GP memperoleh masukan, betapa di gampong sarana bermain dan belajar anak-anak masih sangat terbatas. Anak-anak membutuhkan media-media yang mampu memberikan hiburan, kesenangan sehingga senyum keceriaan dapat hadir kembali di gampong. Kondisi ini juga disadari pula oleh perangkat gampong bagaimana mengatasinya secara baik. Terlebih lagi bila mengingat nasib anak-anak di Aceh belum mengalami keberuntungan yang berarti. Selama konflik anak-anak hidup dalam ketercekaman. Mereka hidup tidak sepenuhnya mendapat bimbingan dan perlindungan, terkadang anak-anak harus hidup berpindah tempat dari berbagai lokasi pengungsian. Mereka tidak dapat bermain-main karena konflik membuat situasi tidak aman.

Konflik berkepanjangan tak jarang membawa keluarga-keluarga di Aceh terperangkap pada kompleksitas keterbatasan sehingga anak-anak juga mengalami persoalan dalam hal kesehatan, pemenuhan makanan yang bergizi, hidup dalam lingkungan yang masih belum teratur pembuangan sampah dan kotoran lainnya. Selain itu anak tidak bisa bersekolah karena keterbatasan biaya yang dimiliki orang tua. Bahkan ada pula anak tidak bersekolah karena harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Anak seperti ini hidup di jalanan dan tak jarang mengalami kekerasan dan perlakuan tidak mengenakkan dari para orang dewasa. Derita konflik belum berakhir kemudian berlanjut pada bencana tsunami. Bencana telah mengubur semua sumber penghidupan masyarakat, akhirnya bermuara pada kesengsaraan hidup anak-anak. Persoalan seperti ini kemudian kerap muncul sebagai penghambat bagi pemenuhan hak-hak mereka sebagai anak yang seharusnya memperoleh perhatian utama.



Istri Bupati Aceh Besar memberikan hadiah pada pemenang lomba festival anak

Menurut Ibu Laila Buchori, istri Bupati Aceh Besar, pada saat memberikan sambutan pembukaan festival anak di Gampong Lamgirek, kejadian yang pernah masyarakat Aceh alami sebelum ini harus menjadi pelajaran berharga, betapa semua unsur masyarakat dan pemerintah di dalam gampong sama-sama berkewajiban untuk menjadikan lingkungan masing-masing gampong kita menghadirkan senyum dan keceriaan bagi anak-anak kita. Gampong yang maju dan berkembang adalah gampong yang di dalamnya anak-anak dapat belajar dan bermain dengan gembira.

Memekarkan Gagasan Peduli Anak

Pemahaman untuk peduli terhadap hak-hak anak di kalangan warga merupakan modal utama memekarkan

pemahaman ini ke dalam tindakan perorangan dikalangan warga juga kelembagaan di tingkat gampong. Mulai bergulirnya kegiatan-kegiatan tim *task force* mulai dirasakan manfaatnya, baik di dalam tim *task force*, masyarakat dan dan jejaring antartim *task force* di keempat gampong. Proses dinamis yang mulai dirasakan dari proses inisiasi tim *task force* terhadap masyarakat dapat dilihat dari proses diskusi-diskusi di dalam kelompok kerja / *task force* untuk menelorkan pemikiran ke dalam tindakan nyata terhadap gampong peduli hak anak ke dalam tiga isu utama, yakni isu kesehatan, pendidikan dan partisipasi anak dalam pembangunan.

Untuk tingkat masyarakat, ada perkembangan menarik bagaimana ketiga isu ini disosialisasikan yang kemudian melahirkan tindakan nyata. Dalam isu pengembangan kesehatan anak, para kader Posyandu di Gampong Birek, Kecamatan Lhoong yang dikoordinir oleh Ani dan Nurhayati mampu mengorganisir dan mengelola kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita secara swadaya dikalangan warga sendiri. Kesadaran ini muncul karena para orang tua yang paling utama memperhatikan kebutuhan dasar anak sehingga tak mungkin selalu bersandar pada pihak dari luar. Seperti disadarinya adanya bantuan PMT dari Puskesmas yang sangat terbatas dan tidak selalu berkelanjutan.

Untuk memenuhi kebutuhan ini masing-masing Kepala Keluarga (KK) memberikan iuran sebesar Rp. 1.000/bulan. Uang yang terkumpul kemudian dikelola oleh kader Posyandu untuk disajikan dalam bentuk aneka makanan olahan secara sehat. Hasil olahan makanan ini memang dijual kembali ke masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau. Selain untuk mengurangi ketergantungan pada Puskesmas, membuat makanan sendiri dipandang lebih terjamin kebersihan dan kesehatannya dibanding membeli snack pabrikan yang bisa saja kurang aman bagi

anak. *Snack* pabrikan memang murah dan menarik kemasannya, tetapi disinyalir banyak menggunakan bahan berbahaya, seperti pewarna rhodamin, borax, dan bahan pengawet lainnya.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus didapat oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Kesehatan telah menempatkan bidan desa di masing-masing gampong, bahkan dibuatkan Polindes dan rumah dinas. Meskipun ada pula beberapa bidan desa yang tidak bersedia menetap dan hanya datang ke gampong bila ada kegiatan Posyandu. Akibatnya pelayanan kesehatan yang didapat masyarakat sangat terbatas, apalagi bila terdapat orang yang sakit di malam hari, masyarakat harus berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit yang ada di ibu kota kabupaten. Informasi tentang pentingnya kesehatan juga sangat terbatas. Untuk mensiasati kondisi ini, maka kader Posyandu dan pemerintah gampong berinisiatif untuk menyebarluaskan informasi tentang sanitasi lingkungan, pencegahan penyakit (diare, malaria, muntaber) melalui forum-forum yang ada di gampong.

Sedangkan untuk soal pendidikan, pengalaman menarik muncul di Gampong Aneuk Paya, Lamgirek dan Gapuy, yang mayoritas anak-anak di gampong ini berusia SD dan SMP. Para orang tua mendorong dan mendukung anak-anak memfungsikan gedung Posyandu tidak hanya sebagai kegiatan balita. Mereka membentuk kelompok belajar anak dengan aneka ragam kegiatan pendidikan, sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Sanggar tari, seni kaligrafi, membuat taman bacaan, belajar mengaji dan mengembangkan taman bermain sehingga turut meramaikan suasana di gedung Posyandu. Bahkan, beberapa anak usia SMP mengusulkan pada perangkat gampong agar ada les komputer dan bahasa Inggris, karena kedua keterampilan tersebut sangat dibutuhkan dalam membangun pergaulan

dan mencari pekerjaan. Usulan ini gambaran nyata akan pentingnya aspirasi atau suara anak yang harus di dengar oleh pemerintahan gampong.

Kesadaran membangun kebersamaan dikalangan sesama warga untuk melakukan tindakan nyata pada kegiatan yang peduli terhadap tumbuh kembang anak seperti di atas merupakan langkah sosial yang sangat berharga. Tindakan semacam ini menjelaskan bahwa nilai-nilai untuk mendorong tumbuh kembang anak ketika sudah tertanam di dalam kesadaran para kaum ibu khususnya, dapat menjadi modal sosial tersendiri yang sangat berharga di dalam mengerakkan pembangunan di dalam gampong nantinya.



Makan bersama membangun kerukunan warga

Pelajaran berharga lainnya yang cukup menggembirakan adalah, cukup banyaknya keterlibatan anak-anak

muda yang masih belum berumah tangga di dalam mendorong kegiatan gampong peduli hak-hak anak. Mereka ini memang juga dilibatkan dalam kegiatan pertemuan-pertemuan dalam tim *task force*. Keaktifan mereka dalam setiap kegiatan-kegiatan di tim *task force* makin menambah dinamisasi kegiatan peduli anak-anak di gampong. Bahkan dalam proses perkembangannya, diantara mereka menjadi ujung tombak kegiatan-kegiatan tim *task force*, seperti pada penyelenggaraan festival anak di gampong.

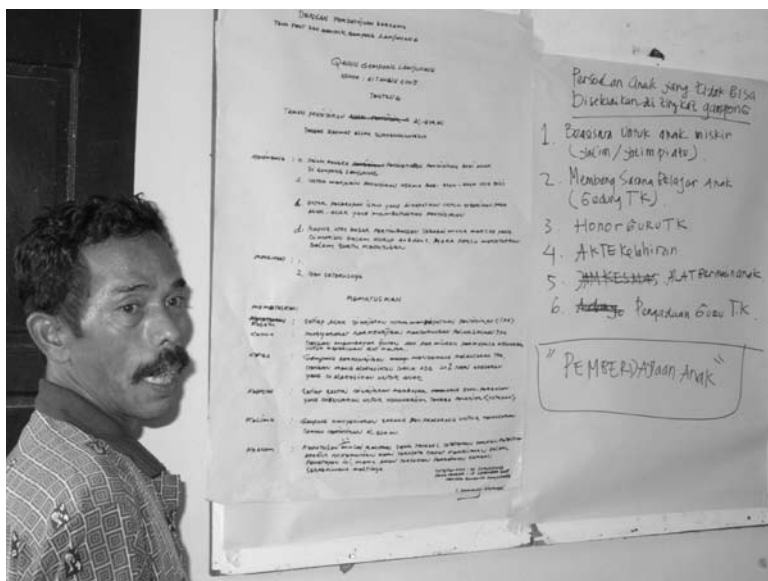
Terdapat pelajaran tersendiri bagi komunitas gampong berkenaan dengan kegiatan festival anak ini. Yakni, selama usai tsunami belum pernah terselenggara keramaian, terlebih kegiatan perlombaan yang melibatkan anak-anak di gampong. Karena itu, ketika tim *task force* dan IRE-GP merencanakan untuk mengadakan kegiatan festival anak di setiap gampong, warga begitu antusias menyambutnya dengan gembira. Dengan penuh semangat mereka bergotong royong, saling membantu menggalang kebersamaan untuk kesuksesan acara yang disusun dalam kegiatan festival anak ini. Saat berbagai perlombaan digelar yang melibatkan dari mulai balita sampai anak di tingkat sekolah menengah atas (SLTA) bahkan kaum ibu terhanyut dalam keceriaan yang luar biasa. Kegiatan semacam ini seolah mengobati kehausan dan kerinduan mereka untuk mengusir rasa sedih dan kepenatan hidup yang masih hadir dalam bilik-bilik hati dan pikiran mereka.

Bagi pemerintahan gampong sendiri, kegiatan festival anak yang begitu disambut dengan antusiasme oleh warganya menjadi pekerjaan rumah tersendiri, bagaimana melanjutkan kegiatan semacam ini di gampong, terutama disaat momen penting seperti perayaan hari-hari besar Islam atau pada perayaan tujuh belas agustus (peringatan hari kemerdekaan) yang biasanya di berbagai tempat di Indonesia penuh dengan hiburan aneka permainan dan perlombaan di kalangan warga. Kegiatan semacam ini juga salah satu bentuk menanamkan kepedulian pada tumbuh

kembang anak.

Kini ada potensi yang mulai tumbuh di gampong. Seperti dengan munculnya kader-kader di masing-masing gampong, baik itu kader Posyandu, pemuda/karang taruna, perangkat gampong (keuchik, sekretaris gampong, Tuhapeut) diharapkan mampu menjadi motivator untuk membangun gerakan gampong ramah anak di masing-masing gampong. Tak kurang sebanyak 63 orang kader (38 perempuan, 25 laki-laki) yang ada di 4 gampong ini yang terlibat berbagai kegiatan program ini diproyeksikan memiliki kemampuan untuk menjadi agen perubahan guna mendobrak perubahan cara pandang dan memasukkan isu anak di dalam perencanaan gampong mereka. Kebutuhan anak tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai berkembang nyata menjadi program yang akan dilakukan di masing-masing pemerintahan gampong.

Pemerintah gampong bersama kader dan Tuhapeut mulai memetakan permasalahan dan kebutuhan mereka dalam membangun gampong peduli hak anak. Seperti dalam perumusan regulasi atau qanun gampong. Selama proses fasilitasi IRE-GP dengan tim *task force* dan perangkat gampong, telah mulai berlangsung proses pembahasan dan perumusan draft qanun yang berupaya untuk memenuhi hak anak dari hal yang paling sederhana dan dapat mereka lakukan, seperti: Qanun tentang PMT untuk anak balita (Gampong Lamgirek, Aneuk Paya), Qanun tentang Pelayanan Kesehatan, khususnya pemenuhan imunisasi lengkap balita (Gampong Birek dan Gapuy), Qanun Taman Bacaan (Gampong Lamgirek, Aneuk Paya, Gapuy). Juga draf Qanun Alokasi Dana Gampong (ADG) yang diperuntukkan nantinya sebanyak 30% untuk pengembangan hak anak sebagaimana yang digagas di gampong Lamgirik, sedangkan untuk gampong Aneuk Paya sebanyak 20%.



Peserta pelatihan mempresentasikan hasil diskusi kelompok pembuatan qanun peduli hak anak

Perbedaan alokasi ini memang didasarkan pada kebutuhan prioritas yang berbeda di masing-masing gampong. Sudah mulai adanya rencana alokasi anggaran untuk anak dan perempuan yang memang sebelumnya belum pernah ada, tentu menjadi kemajuan tersendiri bagi gampong. Meskipun ini belum menjadi kebijakan, namun bila melihat proses penyusunan draf dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan berbagai warga di gampong, terutama para kader Posyandu dan tim *task force*, ada komitmen yang sudah tumbuh kuat di kalangan mereka. Hanya menunggu proses untuk disatukan pembahasannya saat momen pelaksanaan Musrenbang di tingkat gampong yang kini menunggu petunjuk teknis dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Bahkan yang cukup menarik, dari rencana berbagai pembahasan draf qanun tersebut adalah juga adanya

pembahasan upaya merawat dan menjaga keberlanjutan sarana dan prasarana bantuan-bantuan lembaga donor. Seperti gedung Posyandu. Meskipun relatif baru, beberapa bagian dari gedung Posyandu mulai mengalami kerusakan, seperti pagar patah, kran air tidak berfungsi, tidak adanya saluran listrik mati. Muncul kesadaran di pemerintah gampong bahwa gedung Posyandu, Polindes, taman bacaan merupakan aset gampong yang harus dipelihara agar tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Sedangkan dampak yang sangat berharga dirasakan oleh masing-masing tim task force di tingkat gampong adalah terbentuknya jejaring antartim *task force* di keempat gampong yang menjadi lokasi utama program. Dari pertemuan-pertemuan yang difasilitasi IRE-GP tidak saja menghasilkan pertemanan yang akrab antaranggota tim di masing-masing gampong. Lebih dari sekedar itu adalah adanya kebersamaan untuk saling belajar dan mengembangkan komitmen untuk mendorong dan mendinamisasi agar gampong dan juga kebijakan kabupaten semakin peduli terhadap hak anak. Mereka cukup akrab saling berkomunikasi, saling menyapa seperti melalui sms dari *handphone* ke *handphone* yang begitu populer dikalangan warga, berkenaan dengan perkembangan di lingkungannya masing-masing.

Mengatasi Keterbatasan

Pemahaman berkenaan dengan bagaimana anak memiliki hak hidup, mendapatkan perlindungan, tumbuh kembang yang baik serta partisipasi di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, terutama pemerintahan yang dapat mendengarkan suara anak telah cukup dipahami secara baik oleh para kader di gampong, terutama di tingkat tim *task force*. Proses untuk mengaitkan hak anak di dalam kebijakan dan proses perencanaan pembangunan

gampong sedang tengah berlangsung.

Isu pemenuhan hak anak juga sangat terkait pula dengan dinamika pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Proses menggerakkan sumber-sumber ekonomi ini masih dilakukan secara perorangan belum terangkai secara menyatu dengan kebijakan gampong di dalam menggerakkan sumber-sumber ekonomi di tengah masyarakat. Para kaum ibu dan bapak sangat memperhatikan kebutuhan ekonomi keluarga ini dengan mencari nafkah, baik sebagai petani, nelayan atau bergerak di bidang sektor jasa lainnya. Mereka harus membagi waktu, saat-saat harus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga dengan kegiatan sosial terkait dengan isu anak di gampong. Bahkan ada pula para kader harus meninggalkan berbagai kesibukan itu karena sedang menjalani proses kehamilan, melahirkan dan merawat anak yang masih bayi.

Di tengah keterbatasan sumber daya dan tuntutan pekerjaan dan komitmen untuk mengembangkan gampong agar memperhatikan hak-hak anak, tak sedikit yang harus 'jatuh bangun', seperti dalam penuturan Ainul dan Yulidar, kader Posyandu dari gampong Gapuy berikut ini :

Sudah satu tahun ini kegiatan Taman Pendidikan Anak (TPA) kami tidak berjalan...soalnya kak Nurlia dan Kak Elida yang biasa mengurusinya hamil dan melahirkan. Tidak ada orang yang mau mengganti peran mereka, karena pengurus TPA itu tidak digaji dan banyak kegiatan. Bahkan, gedung TPA kami mulai rusak karena mainan anak digunakan untuk orang dewasa dan banyak lembu yang masuk. Pemerintah Gampong pernah sekali memberikan anggaran, setelah itu tidak ada perhatian sama sekali.

Di Gampong Gapuy, sumber daya manusia yang ada memang sangat terbatas. Gampong yang berlokasi di tepian pantai ini saat tsunami menghempaskan cukup banyak putra-putri terbaiknya. Mereka yang tersisa kini melakukan berbagai kegiatan apa saja di dalam menggerakkan kegiatan sosial untuk menghidupkan kembali kegiatan di gampongnya. Para kader disini tidak saja sibuk mencari nafkah, mengurus keluarga terutama anak-anak dan juga berbagi dengan sesama warga lainnya melakukan kegiatan sosial. Kondisi ini juga hampir mirip dengan yang dialami oleh Gampong Birek, yang sama-sama berlokasi di tepian pantai dan kehilangan banyak warganya saat badai tsunami menerjang perkampungan mereka. Semarak warga dalam menggerakkan aktifitas di gampong jauh lebih semarak di dua gampong lainnya, yakni Lamgirek dan Aneuk Paya dimana warganya tidak banyak yang menjadi korban tsunami.

Berbagai keterbatasan ini dicoba diatasi setidaknya oleh tim *task force* yang di gampong mulai difungsikan sebagai media belajar, saling berbagi keluh kesah dan saling berbagi pengetahuan mencari jalan keluar mengatasi permasalahan yang ada. Di dalam tim *task force* yang keanggotannya berasal dari berbagai komponen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, kaum ibu, keuchik, Tuhapeut dan perangkat gampong memudahkan mengatasi permasalahan atau keterbatasan yang ada dengan cara saling berbagi peran sehingga lebih memberikan kemudahan mengatasi permasalahan yang ada.

Di tengah berbagai capaian yang diperoleh juga banyak cukup banyak problema di lapangan yang belum dan masih dalam proses untuk mengatasi permasalahan yang ada. Misalnya, dalam diskusi di tingkat tim *task force* muncul berbagai kritik lingkungan yang tidak cukup nyaman untuk anak-anak. Seperti pagar berduri di perkan-toran dan rumah-rumah warga. Pagar berdiri ini cukup

berbahaya dari lalu lalang anak yang kerap kali bermain sambil berlarian yang jika terkena anak atau siapapun dapat membuat tubuh terluka. Sampai dengan saat ini pagar berduri ini masih menjadi pemandangan di gampong.

Begitu pula dengan praktek beberapa keluarga di gampong yang kadang tidak sabaran dalam menegur anak dengan pendekatan kekerasan. Tindakan semacam ini disadari sebagai cara yang tidak cukup memberi tauladan dalam mendidik anak. Menghilangkan praktek ini memang butuh proses waktu, namun mulai adanya kesadaran bahwa praktek semacam ini tak layak ditauladani tentu menjadi pelajaran berharga yang pantas untuk diapresiasi.

Program kerjasama antara IRE-GP bersama masyarakat, pemerintahan gampong, tim *task force* dan *stakeholder* lainnya untuk mendorong gampong agar peduli hak anak hanya dilaksanakan beberapa bulan. Penyakit lama dari suatu program adalah berhenti begitu saja tanpa ada bekasnya. Apakah hal ini akan terjadi pula dalam program ini ?. Tentu saja tidak!. Sejak awal, IRE - GP telah merencanakan strategi keberlanjutan program. Bagaimanan strategi keberlanjutan itu diwujudkan ?. Hal ini akan disajikan dalam bab berikutnya.

Strategi Membangun Keberlanjutan

Mainstreaming Hak Anak

Mengapa perwujudan hak-hak anak tersebut menjadi penting?. Anak adalah amanah Allah SWT yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Anak bukan orang dewasa ukuran kecil, tetapi seorang manusia yang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Mereka memiliki posisi strategis, karena jumlahnya 38 persen dari total penduduk Indonesia. Penanganan isu anak yang masuk dalam kegiatan tata kelola pemerintah gampong merupakan wujud awal dari upaya mengintegrasikan penanganan anak lebih tersistematis dan struktural serta mendapatkan anggaran/*budget* yang memadai. Selama ini, urusan anak adalah urusan domestik yang berarti orang tua. Anak dianggap titipan Tuhan yang mengharuskan setiap orang mengatur, mengurus bahkan mendidik anak hingga menjadi tanggungjawab orang tua atau wali yang mengasuhnya. Pandangan umum inilah yang menyebabkan anak seringkali menjadi obyek kepentingan

dan ambisi orang tua untuk masa depannya. Dalam kasus keluarga yang rentan ekonomi, anak menjadi korban kekerasan dari orang tua dan sekitarnya baik, sehingga sering muncul kekerasan anak dalam ekonomi maupun seksual. Anak dianggap tidak mempunyai posisi dalam membuat keputusan. Akibat lemahnya kondisi anak inilah, banyak kasus kekerasan pada anak yang muncul dipermukaan, hanya mendapatkan simpati dan menghiasi berbagai media massa saja.

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) sehingga sudah sepatutnya memperjuangkan pemenuhak hak bagi setiap anak, yaitu : hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi dan hak mendapatkan perlindungan yang layak. Konvensi ini memberikan kewajiban bagi setiap negara yang telah meratifikasinya, diwujudkan dalam negaranya. Kewajiban tersebut telah diwujudkan pemerintah RI dengan memasukkan hak anak kedalam amandemen konstitusi UUD 1945 dan dimasukkan kedalam pasal 28b. Hal ini menjadi cukup fenomenal karena Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang telah memasukkan hak anak kedalam konstitusinya. UU Perlindungan Anak nomer 23 tahun 2002 merupakan upaya memberikan hak anak secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pengimplementasian UU Perlindungan Anak tersebut diwujudkan dalam penetapan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PN-BAI) 2015 yang isinya merupakan target-target pencapaian hak-hak anak berdasarkan pada upaya pencapaian MDGs (*Millenium Development Goals*) 2015 dan harus diwujudkan pula oleh Indonesia hingga tahun 2015, bahkan hingga dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga negara yang bertugas khusus memantau keefektifan upaya-upaya penyelenggaraan hak-hak anak di Indonesia. Namun demikian, perlindungan hak-hak anak bukan berarti menjadi sepenuhnya tanggung jawab

negara atau KPAI. Perlu ditekankan dalam hal ini, baik dalam KHA maupun UU PA nomer 23 tahun 2002, perwujudan hak anak merupakan tanggung jawab dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Hal ini berarti seluruh *stakeholders* berkepentingan penuh terhadap pemenuhan hak-hak anak. Anak menjadi kunci utama sebagai potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa sehingga perlu adanya komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Upaya nyata bisa diwujudkan dengan menciptakan lingkungan yang mengutamakan perlindungan bagi anak, serta menghidupkan nilai-nilai dan tradisi yang memajukan harkat dan martabat anak. Selain itu, mendorong proses-proses eksplorasi dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak.

Kesemua upaya ini adalah mendorong munculnya *mainstreaming* (pengarusutamaan) anak di setiap sendi kehidupan. Dengan semakin dinamisnya kondisi perubahan zaman saat ini, maka perwujudan hak-hak anak tersebut di Indonesia amat diperlukan, apalagi semakin tingginya persaingan antar negara dalam mewujudkan manusia masa depan yang berkualitas. Sementara ini, Indonesia masih terus berkutat di tempat memperbaiki kualitas manusianya, negara lain sudah melangkah jauh. Oleh karena itu, Indonesia kini harus segera mengakselerasi seluruh upaya-upayanya. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh pihak termasuk masyarakat di dalamnya.

Pengembangan program gampong peduli hak anak adalah salah satu upaya membangun kesadaran sekelompok masyarakat dalam gampong tentang betapa pentingnya urusan anak menjadi urusan publik masyarakat gampong. Setiap kelompok masyarakat dalam gampong baik laki-laki, perempuan atau kelompok masyarakat yang

berada dalam gampong mulai diperkenalkan tentang hak anak, upaya perlindungan serta pendekatan anak yang memberikan ruang bagi anak menyuarakan kebutuhan dan kepentingannya. Pelatihan-pelatihan yang diberikan dalam program gampong peduli hak anak, mampu memberikan ruang pembelajaran berbagai kader masyarakat, pemerintah gampong hingga Tuhapeut. Mereka mulai memahami melihat kondisi anak yang rentan terhadap perubahan situasi. Mendorong tumbuhnya berbagai komponen masyarakat yang memperjuangkan terpenuhinya kebutuhan dasar anak. Tantangan besar kedepan komponen-komponen masyarakat ini dalam membangun hubungan dengan pihak luar (eksternal) dalam pemerintahan di tingkat kabupaten maupun pihak-pihak lainnya.

Memberikan Alokasi yang Memadai

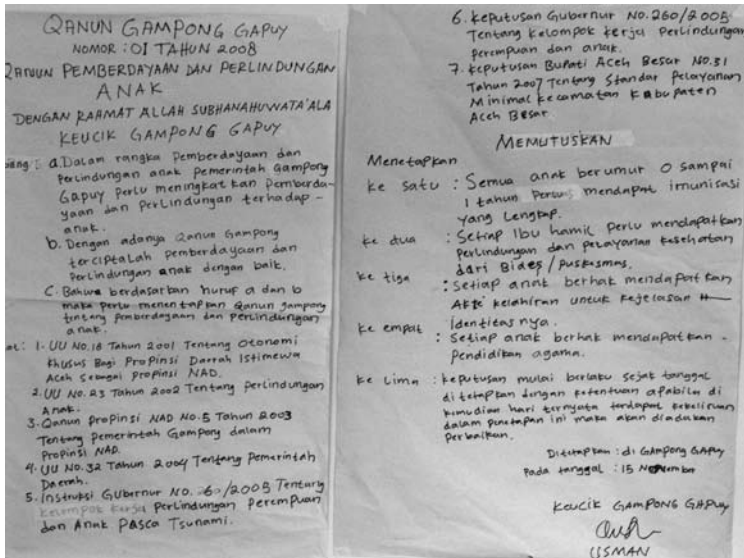
Selama ini, karena minimnya perhatian kepada kebutuhan anak, maka program yang dibangun oleh berbagai pihak pemerintah termasuk gampong dan alokasi dana dalam memenuhi hak anak tidak seimbang. Kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi pada pembangunan fisik dan pemenuhan kepada kebutuhan orang dewasa lebih dominan. Ketika pembangunan salah berorientasi pada kebutuhan sekelompok orang, maka kebutuhan sekelompok lainnya akan timpang. Pemenuhan kebutuhan anak yang disamakan dengan kondisi orang dewasa menjadikan anak termarginalkan pada kondisi lingkungannya, apalagi ruang untuk mendengar kebutuhan mereka tidak tersedia. Ketika era reformasi banyak menggeser ruang-ruang publik bagi masyarakat dalam menyuarakan kepentingannya, tidak serta merta ruang tersebut mampu diakses oleh anak-anak. Perencanaan pembangunan gampong yang dianggap sebagian orang sebagai ruang partisipasi dalam membahas kebutuhan-kebutuhan oleh sekelompok masyarakat, seringkali tidak mampu mengakomodir ke-

butuhan anak. Anak yang notabene lebih dekat dengan ibu, pendanaan bagi anak dimasukkan alokasi dalam PKK. Kebutuhan anak tidak dialokasikan secara khusus baik untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya (kesehatan dan pendidikan) maupun kebutuhan tumbuh kembangnya.

Program gampong peduli hak anak mencoba menekankan pentingnya mengalokasikan dana untuk anak baik lewat program langsung maupun tidak langsung (misalnya imunisasi, taman bacaan, tempat belajar, dan lain-lain). Perubahan ini dicoba diterapkan di Gampong Anaek Paya dan Lamgirek (Kecamatan Lhoknga) serta Birek dan Gapuy (Kecamatan Lhoong) dalam menyusun rencana pembangunan gampong (RPG). Walaupun secara tertulis adanya sebuah rencana program dalam RPG mereka merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa. Tetapi, tantangan menjadikan perencanaan mereka sebuah program riil masih membutuhkan proses waktu yang tidak singkat. Perencanaan gampong yang masuk dalam perencanaan kabupaten seringkali hilang bahkan tidak masuk dalam prioritas dalam perencanaan kabupaten. Hal ini berarti akan menghilangkan kesempatan program bagi anak. Perlunya membangun tim atau orang-orang yang paham akan kebutuhan dan isu anak itu masuk dalam siklus perencanaan dari tingkat paling rendah yakni gampong, kemudian kecamatan hingga kabupaten, dengan melakukan pengawasan agar program bagi anak tidak hilang. Membangun mainstream anak di berbagai paman-gku kepentingan adalah juga bentuk menjaga konsistensi terpenuhinya hak anak.

Regulasi, Perwujudan Kesepakatan Politik Lokal hingga Nasional

Munculnya berbagai regulasi adalah salah satu upaya mengikatkan sebuah kepentingan bersama menjadi sebuah kesepakatan tertulis yang berkonsekwensi pada hukum.



Qanun Gampong menjadi jaminan perlindungan terhadap anak

Adanya berbagai regulasi tentang anak merupakan upaya memberikan kepastian hukum terhadap berbagai urusan perlindungan dan perwujudan hak anak, walaupun kenyataannya seringkali tidak mudah melakukannya. Dengan adanya UU perlindungan anak sejak tahun 2002, tidak serta merta anak-anak terlindungi hak-haknya, masih banyak sekali kasus yang menimpa anak-anak. Kelemahan ini disadari oleh banyak pihak karena peraturan turunan UU ini hingga ke daerah, perangkat pelaksanaannya hingga penegakan hukum masih lemah. Urusan anak seringkali hanya diselesaikan dalam komunitas dan menggunakan perangkat sosial saja, sehingga seringkali tidak tuntas.

Dalam gampong peduli hak anak, salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun kesepakatan tentang mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak lewat kesepakatan tertulis dan mengikat semua kelompok masyarakat tersebut. Qanun gampong yang

merupakan wujud kesepakatan tersebut memuat isi dan konsekwensi dari kesepakatan yang ada. Adanya qanun ini menjadi ikatan bagi seluruh masyarakat gampong memberikan perlindungan bagi anak dan mengupayakan terwujudnya hak-haknya. Kondisi ini menguntungkan banyak anak, di mana ketika terjadi pergantian pimpinan dan pengurus di gampong, qanun ini merupakan bukti tertulis yang baik untuk menagih bukti.

Tantangan mewujudkan qanun tentang anak di gampong adalah memastikan semua komponen masyarakat dalam gampong paham materi dan konsekwensinya. Selain itu, isi/materi qanun tidak boleh bertentangan dengan regulasi di atasnya (Perda hingga UU), karena secara hirarkhi hukum, peraturan dibawah UU harus sejalan dan tidak bertentangan. Namun demikian, keunikan qanun gampong adalah menuangkan materi sederhana yang terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik lokal, sehingga sangat jarang qanun tentang anak yang muncul akan bertentangan dengan regulasi di atasnya. Demikian halnya penegakan hukumnya, karena qanun ini hanya mengikat sekelompok masyarakat dalam gampong, maka memudahkan mekanisme dan struktur pelaksanaannya.

Untuk mendorong proses penguatan dan keberlanjutan paska pendampingan Plan International dan IRE-GP maka strategi keberlanjutan yang telah didisain di dalam kelembagaan dan bekerjanya modal sosial di tingkat gampong adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengintegrasikan kegiatan tim *task force* kedalam tata kelola pemerintahan gampong melalui : (a)peningkatan partisipasi kelompok perempuan dan anak untuk terlibat aktif dalam memperjuangkan anak di tingkat gampong; (b) diakuinya kelompok perempuan dan kelompok anak-anak dalam sistem pengambilan kebijakan di tingkat gampong untuk memperjuangkan hak-hak anak.

Kedua, mendorong regulasi gampong yang memihak terhadap hak-hak anak dengan mengikutsertakan kelompok perempuan dan anak dalam perencanaan dan pembangunan gampong. Hal ini dimaksudkan agar ada regulasi gampong (qanun gampong) yang memastikan keterlibatan perempuan dan anak dalam proses perencanaan dan pembangunan gampong. *Ketiga*, mendorong adanya kebijakan yang memberi kepastian alokasi dana gampong untuk pemenuhan program hak anak. Kebijakan ini dipastikan melalui qanun gampong. *Keempat*, mendorong tim *task force* untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk mendorong dipenuhinya kebutuhan hak anak yang tidak dapat ditangani oleh gampong yang menjadi kewenangan kabupaten. *Kelima*, mendorong tim *task force* agar terlibat aktif dalam advokasi kebijakan publik di tingkat kabupaten, terutama yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak.

LAMPIRAN:

RANCANGAN
KEPUTUSAN KEUCHIK GAMpong ANEUK PAYA
tentang
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHUWATA'ALA

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka menjaga pemenuhan kebutuhan hak anak dan perempuan, maka untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, perlu disusun qanun gampong yang berorientasi pada anak dan perempuan.
 - b. Bahwa dalam penyusunan qanun gampong tentang pemberdayaan dan perlindungan anak dan perempuan sebagai jaminan adanya kepastian bagi warga masyarakat gampong untuk mendukung pelaksanaan qanun gampong tentang pemberdayaan dan perlindungan anak dan perempuan.
 - c. Bahwa pemberdayaan dan perlindungan anak dan perempuan perlu dibuat berbagai kegiatan yang mendukung tercipta dan tercapainya pemberdayaan

dan perlindungan anak dan perempuan yang terarah, sehingga akan melahirkan anak-anak yang progresif, visioner, religius dan bermartabat.

- Mengingat :**
1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi NAD.
 4. Qanun Propinsi NAD No.5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dalam Propinsi NAD
 5. Instruksi Gubernur NAD No.6/2005 tentang Perlindungan Perempuan Anak Paska Tsunami
 6. Keputusan Gubernur No. 260/2005 Tentang Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan anak.
 7. Keputusan Bupati Aceh Besar No.31 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Kabupaten Aceh Besar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Qanun tentang pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Gampong Aneuk Paya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Qanun adalah peraturan gampong yang tertulis dan yang isinya norma-norma adat istiadat disepakati bersama warga masyarakat yang bersifat mengikat dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan gampong.
2. Gampong adalah kumpulan masyarakat yang paling terendah di dalam susunan organisasi pemerintahan yang dipimpin oleh seorang keuchik dengan dibantu oleh sekretaris gampong, kepala dusun, kepala urusan.
3. Keuchik adalah pemimpin yang ada dalam pemerintahan gampong
4. Tuhapeut adalah badan yang ada dalam pemerintahan gampong yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bertugas untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan di gampong sebagai badan pertimbangan pemerintah gampong.
5. Perlindungan adalah kegiatan yang ada dalam pemerintah gampong yang bertujuan untuk memberikan jaminan keberlanjutan, kenyamanan dan keamanan.
6. Anak adalah usia dalam kandungan hingga 18 tahun yang berada di wilayah Gampong Aneuk Paya.
7. Pemberdayaan adalah memberikan kebebasan dan peluang kepada anak untuk melakukan aktivitas.
8. Pelayanan adalah pemerintah gampong memfasilitasi anak untuk mendapatkan akses kesehatan melalui program Posyandu, pemerintah gampong membantu proses pendidikan, memberikan jamin

terhadap kehidupan yang layak, menjamin keberlanjutan sosial budaya yang ada.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Qanun ini adalah akses atau pelayanan dari pemerintah gampong terhadap anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi perlindungan terhadap sosial budaya.

BAB III

PRINSIP DASAR DAN TUJUAN

Pasal 3

Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan anak di Gampong didasarkan pada :

- a. Asas kebersamaan dalam mencapai ketaifitas, rasa aman dan nyaman.
- b. Asas keadilan dan terbuka.
- c. Asas penghormatan terhadap keputusan bersama.
- d. Asas pemberdayaan.

Pasal 4

Tujuan dilaksanakan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak melalui Qanun Gampong adalah :

- a. Mewujudkan peran anak dalam membangun gampong lebih kreatif berpikir maju, rasa aman dan

- nyaman.
- b. Meningkatkan kemampuan anak dalam aktivitas di gampong.
 - c. Meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah gampong dalam pelayanannya terhadap anak.
 - d. Menciptakan harmonisasi antara anak dan orang tua.

BAB IV

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 5

- (1) Setiap anak di gampong wajib mendapatkan kesempatan dan pendidikan yang memadai.
- (2) Pemberdayaan setiap anak yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberdayaan pada faktor pelayanan pendidikan.
 - b. Pemberdayaan pada akses pengembangan sumberdaya manusia.
 - c. Pemberdayaan pada faktor pelayanan ekonomi.
 - d. Pemberdayaan pada faktor pengembangan kreatifitas melalui seni budaya dan sosial.

Pasal 6

Bagian Kedua

Perlindungan

- (1) Setiap anak dalam gampong mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan oleh peme-

rintah gampong.

- (2) Perlindungan yang dimaksud dalam pasal (1) diatas meliputi :
 - a. Perlindungan dari bahaya luar.
 - b. Perlindungan dari ancaman baik dari keluarga maupun orang lain.
 - c. Perlindungan terhadap jaminan hidup yang layak.
 - d. Perlindungan terhadap kesejahteraan dan hidup layak.

BAB V

PROSEDUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan gampong memfasilitasi pengadaan bea siswa bagi anak yang kurang mampu.
- (2) Menganggarkan sekurang-kurangnya 5 % dari APBG untuk bea siswa.

BAB VI

PROSEDUR PELAKSANAAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kesehatan memaksimalkan pelayanan Polindes bagi masyarakat di gampong.
- (2) Menganggarkan melalui dana APBG sekurang-kurangnya 5 % untuk kebutuhan kesehatan melalui Posyandu.

BAB VII

PROSEDUR PELAKSANAAN PENINGKATAN EKONOMI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan peningkatan ekonomi melalui usaha ekonomi produktif rumah tangga.
- (2) Menganggarkan melalui dana APBG sekurang-kurangnya 10 % untuk pengembangan industri rumah tangga, maupun sektor pertanian.

BAB VIII

PROSEDUR PELAKSANAAN SOSIAL BUDAYA

Pasal 10

- (1) Menjamin keberlanjutan pelestarian adat istiadat yang ada di Gampong Aneuk Paya,
- (2) Dilindunginya sistem sosial budaya yang berkembang dalam gampong.
- (3) Difasilitasi kegiatan-kegiatan seni budaya daerah yang ada.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aneuk Paya
Pada tanggal :.....
KEUCHIK ANEUK PAYA

BUKHARI ALI

Diundangkan di : Aneuk Paya
Pada Tanggal :.....

SEKRETARIS GAMPONG

MOCHTARUDIN

LAMPIRAN:

RANCANGAN
QANUN GAMPONG LAMGIREK
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK MELALUI RPJMG DAN
APBG
DENGAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHUWATA'ALA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintah Gampong Lamgirek untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas anak.
- b. Bahwa standar pelayanan gampong sebagai jaminan adanya kepastian bagi anak untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat :

- 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa

- Aceh Sebagai Propinsi NAD.
4. Qanun Propinsi NAD No.5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dalam Propinsi NAD.
 5. Instruksi Gubernur NAD No.6/2005 tentang Perlindungan Perempuan Anak Paska Tsunami.
 6. Keputusan Gubernur No. 260/2005 tentang Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan anak.
 7. Keputusan Bupati Aceh Besar No.31 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Kabupaten Aceh Besar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG PER-
LINDUNGAN ANAK
MELALUI RPJMG DAN APBG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Qanun adalah peraturan gampong yang tertulis dan yang isinya norma-norma adat istiadat disepakati bersama warga masyarakat yang bersifat mengikat dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan gampong.
2. Gampong adalah wilayah yang yang ditempati oleh

- sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah mukim. (
3. Keuchik adalah pemimpin yang ada dalam pemerintahan gampong
 4. Tuhapeut adalah badan yang ada dalam pemerintahan gampong yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bertugas untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan di gampong sebagai badan pertimbangan pemerintah gampong.
 5. Perlindungan adalah kegiatan yang ada dalam pemerintah gampong yang bertujuan untuk memberikan jaminan keberlanjutan.
 6. RPJMG adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong.
 7. APBG adalah Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.
 8. Kualitas dan kuantitas anak adalah kemampuan anak untuk berkreaitif, berpikir lebih maju, rasa aman dan nyaman.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Qanun ini adalah perlindungan anak melalui RPJMG dan APBG yang berpihak terhadap anak terutama tentang pemberian anggaran untuk alokasi dana taman bacaan sebesar 25 % tiap tahun.

BAB III

PRINSIP DASAR DAN TUJUAN

Pasal 3

Pelaksanaan perlindungan anak melalui RPJMG dan APBG dalam kebijakan Gampong didasarkan pada :

- a. Asas kebersamaan dalam mencapai kretaititas, rasa aman dan nyaman.
- b. Asas keadilan dan terbuka.
- c. Asas penghormatan terhadap keputusan bersama.
- d. Asas pemberdayaan.

Pasal 4

Tujuan dilaksanakan Perlindungan Anak melalui RPJMG dan APBG dalam Qanun Gampong adalah :

- a. Mewujudkan anak dalam gampong lebih kreatif berpikir maju, rasa aman dan nyaman.
- b. Meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir maju.
- c. Meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah gampong dalam melindungi anak.
- d. Menciptakan harmonisasi antara anak dan orang tua.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK MELALUI DANA RPJMG

DAN APBG

Bagian kesatu Perlindungan

Pasal 5

- (1) Setiap anak dalam Gampong mendapatkan perlindungan yang sama.
- (2) Perlindungan setiap anak yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Perlindungan keamanan.
- b. Perlindungan mendapatkan kesempatan belajar di taman bacaan.
- c. Perlindungan keberlanjutan taman bacaan.

Pasal 6

Setiap anak sebagai pengguna taman bacaan berkewajiban menjaga keberlangsungan taman bacaan yang tidak bertentangan dengan peraturan gampong.

Bagian Kedua RPJMG Pasal 7

- (1) Pemerintah gampong dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong wajib mengikutsertakan peran anak.
- (2) Anak diberi kesempatan untuk menyampaikan ide atau gagasan dalam musyawarah.
- (3) Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong alokasi dana untuk Taman Bacaan sebesar tidak kurang dari 25 % anggaran yang ada.

Bagian Ketiga APBG Pasal 8

- (1) Pemerintah Gampong dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Wajib mengikutsertakan peran anak
- (2) Anak diberi kesempatan untuk menyampaikan

- ide atau gagasan dalam musyawarah.
- (3) Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong alokasi dana untuk Taman Bacaan sebesar tidak kurang dari 25 % anggaran yang ada.

BAB V

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran perlindungan anak melalui RPJMG dan APBG bekerjasama dengan kader Posyandu di gampong.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana taman belajar dikelola oleh Posyandu dan diatur dikemudian berdasarkan kesepakatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat berlakunya peraturan ini semua peraturan yang ada sehubungan dengan perlindungan anak sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamgirek
Pada tanggal :.....

KEUCHIK LAMGIREK,

Abd. Basir

Diundangkan di : Lamgirek
Pada Tanggal :.....

SEKRETARIS GAMPONG

.....

Biodata Penulis

Abdur Rozaki

Peneliti *Institute for Research and Empowerment* (IRE) Yogyakarta dan Pengajar mata kuliah *social work* di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: *durzaki@yahoo.com*

Arie Sujito

Direktur IRE Yogyakarta dan Staf Pengajar Jurusan Sosiologi Fisipol UGM. Kini sedang menempuh program doktor sosiologi di UGM. Email: *arierevolution@yahoo.com*

Anang Sabtoni

Peneliti IRE Yogyakarta, dan alumni sarjana kehutanan UGM. Menaruh perhatian pada isu-isu lingkungan, pertanian dan gerakan sosial masyarakat sipil . Email: *anang@ireyogya.org*

Krisdyatmiko

Deputy Direktur IRE Yogyakarta dan staf pengajar di Jurusan Ilmu Sosiatri Fisipol UGM. Kini sedang menyelesaikan program doktor bidang penyuluhan dan komunikasi pembangunan di paska sarjana UGM. Email: *krisdyatmko@ireyogya.org*

Sulistiyani

Panggilan akrabnya Mbak Nunik. Ia aktivis Gita Pertiwi Solo. Menaruh perhatian pada isu-isu anak, lingkungan dan kedaulatan pangan. Email: *nuniksulistiyani@yahoo.com*

Rossana Dewi Rachmawati

Direktur Gita Pertiwi Solo. Ia menaruh perhatian utama pada isu anak, lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Email: *dewiross@yahoo.com*

Suparlan

Staf Gita Pertiwi Solo yang sangat *concern* pada isu-isu anak, lingkungan dan tata pemerintahan lokal. Email: *parlanwng@yahoo.com*

Titik Eka Sasanti

Alumni Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, dan staf Gita Pertiwi Solo yang menaruh minat pada isu lingkungan, pertanian dan pengembangan desa untuk penghidupan masyarakat yang berkelanjutan. Email: *titikeksa@yahoo.com*